



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(LKjIP- SKPD)
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KLIRONG
Jl.Klegenwonosari No. – Telp.- Kode Pos: 54381**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat serta hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Klirong Tahun 2025 ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Penyusunan LKJIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Klirong melalui sistem akuntabilitas kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen ini berisi capaian kinerja sepanjang Tahun Anggaran 2025 berdasarkan indikator kinerja utama dan indikator kinerja program, yang diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah serta Renstra Kecamatan Klirong Tahun 2021–2026. Selain memberikan gambaran capaian, LKjIP ini juga menjadi media evaluasi, pembelajaran, serta dasar perbaikan kinerja pada tahun berikutnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan, perangkat daerah, dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan serta kontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga LKjIP ini dapat memberikan manfaat bagi pengguna, menjadi instrumen evaluasi kinerja yang akuntabel, serta meningkatkan komitmen kita dalam mewujudkan Kecamatan Klirong yang maju, aman, sejahtera, dan berdaya saing.

Kebumen, 30 Januari 2026

Camat Klirong
Kabupaten Kebumen



Eko Purwanto, S.STP. M.S.i
Pembina Tingkat I/IVb
NIP.19790116199810100

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Gambaran Umum Organisasi	1
1.2.Fungsi Strategis	4
1.3.Permasalahan utama yang dihadapi.....	18
1.4.Landasan Hukum	19
1.5.Sistematika	21
1.6.Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE)	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	26
2.1. Perencanaan Strategis.....	26
2.1.1.Rencana Strategis (Renstra).....	26
2.1.2. Indikator Kinerja Utama.....	32
2.1.3.Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis	33
2.2.Perjanjian Kinerja.....	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	37
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	37
3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	39
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Akhir Renstra 2021-2026.....	42
3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten.....	44
3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	46
3.1.6. Analisis atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya	50

3.1.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan
ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 52

BAB IV PENUTUP..... 58

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja 58

4.2 Permasalahan/Kendala 58

4.3 Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang 59

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Kecamatan Klirong Tahun 2024.....	3
Tabel 1.2. Kondisi Pegawai Kecamatan Kecamatan Klirong	4
Tabel 1.3. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan	19
Tabel 2.1. Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026	31
Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Klirong	32
Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	32
Tabel 2.4. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Klirong Tahun 2025	34
Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Perubahan II Tahun 2025.....	35
Tabel 2.6. Perbandingan Kebutuhan SDM dengan Realisasi Tahun 2025	51
Tabel 3.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	39
Tabel 3.2. Realisasi IKM Kecamatan Klirong Triwulan I s,d IV Tahun 2025	40
Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat	42
Tabel 3.4. Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Sasaran Strategis	43
Tabel 3.5. Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten.....	44
Tabel 3.6. Perbandingan IKM Kecamatan Petanahan, Kecamatan Klirong, Kecamatan Bulus Pesantren, dan Kecamatan Puring	45
Tabel 3.7. Analisis Keberhasilan dan Upaya yang dilakukan untuk Mencapai Target di Masa yang akan Datang	47
Tabel 3.8. Efisiensi Anggaran	50
Tabel 3.9. Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan Pendukung	52
Tabel 3.10. Realisasi Anggaran Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2025.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Kecamatan Klirong	2
Gambar 1.2. Bagan Organisasi Kecamatan Klirong.....	6
Gambar 3.1.Dokumentasi Pelaksanaan Review LkjIP Kecamatan Klirong Tahun 2025	38

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Kecamatan Klirong sebagai perangkat daerah Kabupaten Kebumen memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025. Penyusunan LKjIP ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

LKjIP Kecamatan Klirong Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat selama tahun anggaran 2025. Laporan ini menyajikan informasi mengenai perencanaan kinerja, capaian kinerja, penggunaan sumber daya, serta evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan, seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Klirong.

Selain sebagai bentuk akuntabilitas kepada Bupati Kebumen dan masyarakat, LKjIP juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi kinerja untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran strategis kecamatan. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas pelaksanaan program, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran di lingkungan Kecamatan Klirong.

Dengan disusunnya LKjIP Kecamatan Klirong Tahun 2025, diharapkan dapat terwujud transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur kecamatan, sekaligus menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan kinerja pada tahun-tahun berikutnya guna mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kebumen.

1.1. Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Klirong merupakan bagian dari Kabupaten Kebumen. Secara geografis Kecamatan Klirong terletak pada

7,7696 – 7,6893 Lintang Selatan dan 109,6092 – 109,6464 Bujur Timur. Dengan luas 4.325 hektar atau 43,25 km² yang berada diketinggian rata-rata 13-24 meter dari permukaan laut, batas wilayah Kecamatan Klirong adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Petanahan;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Buluspesantren;
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pejagoan;
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia.



Gambar 1. 1. Peta Kecamatan Klirong

Kecamatan Klirong terdiri dari 24 desa. Desa Kedungwinangun merupakan wilayah yang berada paling jauh dari Ibu Kota Kecamatan (± 7 km), namun merupakan desa yang paling dekat dengan Ibu Kota Kabupaten Kebumen (6 Km). Sedangkan Desa Klegenwonosari merupakan desa yang mempunyai jarak

tempuh paling dekat dengan Ibu Kota Kecamatan karena merupakan ibu kota kecamatan. Desa Jogosimo merupakan desa paling ujung dan merupakan desa terjauh dari Ibu Kota Kabupaten (20 Km). Luas wilayah Kecamatan Klirong adalah 4.325 Ha atau 43,25 Km², terdiri dari 1.391 Ha (32 persen) lahan sawah dan 2.934 Ha (68 persen) lahan kering. Desa Tanggulangin adalah desa yang memiliki wilayah terluas yaitu 509 Ha (11,76 persen). Desa Karangglonggong merupakan wilayah yang mempunyai luas lahan paling sempit yaitu 82 Ha (±1,90 persen).

Gambaran Penduduk di Kecamatan Klirong sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1. Jumlah Penduduk Kecamatan Klirong Tahun 2024

NO	DESA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1.	Jogosimo	1902	1844	3746
2.	Tanggulangin	2033	1943	3976
3.	Pandanlor	1517	1513	14653030
4.	Tambakprogaten	1503	1465	2968
5.	Gebangsari	1201	1154	2355
6.	Klegenrejo	1880	1822	3702
7.	Bendogarap	870	920	1790
8.	Kedungsari	1541	1566	3107
9.	Jerukagung	1344	1356	2700
10.	Klegenwonosari	1138	1166	2304
11.	Klirong	900	894	1794
12.	Kaliwungu	910	864	1774
13.	Jatimalang	1124	1083	2207
14.	Karangglonggong	351	367	718
15.	Ranterejo	1000	903	1903
16.	Wotbuwono	1529	1451	2980
17.	Tambakagung	1268	1240	2508
18.	Sitirejo	778	801	1579
19.	Gadungrejo	1072	1040	2112

NO	DESA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
20.	Dorowati	1884	1736	3620
21.	Bumiharjo	1868	1788	3656
22.	Kebadongan	1679	1585	3264
23.	Podoluhur	2371	2314	4685
24.	Kedungwinangun	2733	2626	5359
JUMLAH TOTAL		34.396	33.441	67.837

(Sumber: Buku Data Agregat Kependudukan Tahun 2024)

Kecamatan Klirong dari aspek demografi penduduk Kecamatan Klirong berjumlah 67.837 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 34.396 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 33.441 jiwa. Secara rasio jumlah penduduk laki-laki adalah sebanyak 50,70% sedangkan rasio penduduk perempuan adalah 49,30%. Perbedaan rasio jumlah penduduk laki-laki dibandingkan jumlah penduduk perempuan sangat tipis yaitu sebesar 1.40%.

Sedangkan jumlah pegawai Kecamatan Klirong dapat dikategorikan dalam beberapa kategori berikut:

Tabel 1. 2. Kondisi Pegawai Kecamatan Kecamatan Klirong

Jenis Kelamin	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Laki-laki	9	13	9	9	8
Perempuan	2	3	4	5	5
Jumlah ASN	11	16	13	14	13

(Sumber: Kecamatan Klirong, September 2025)

1.2. Fungsi Strategis

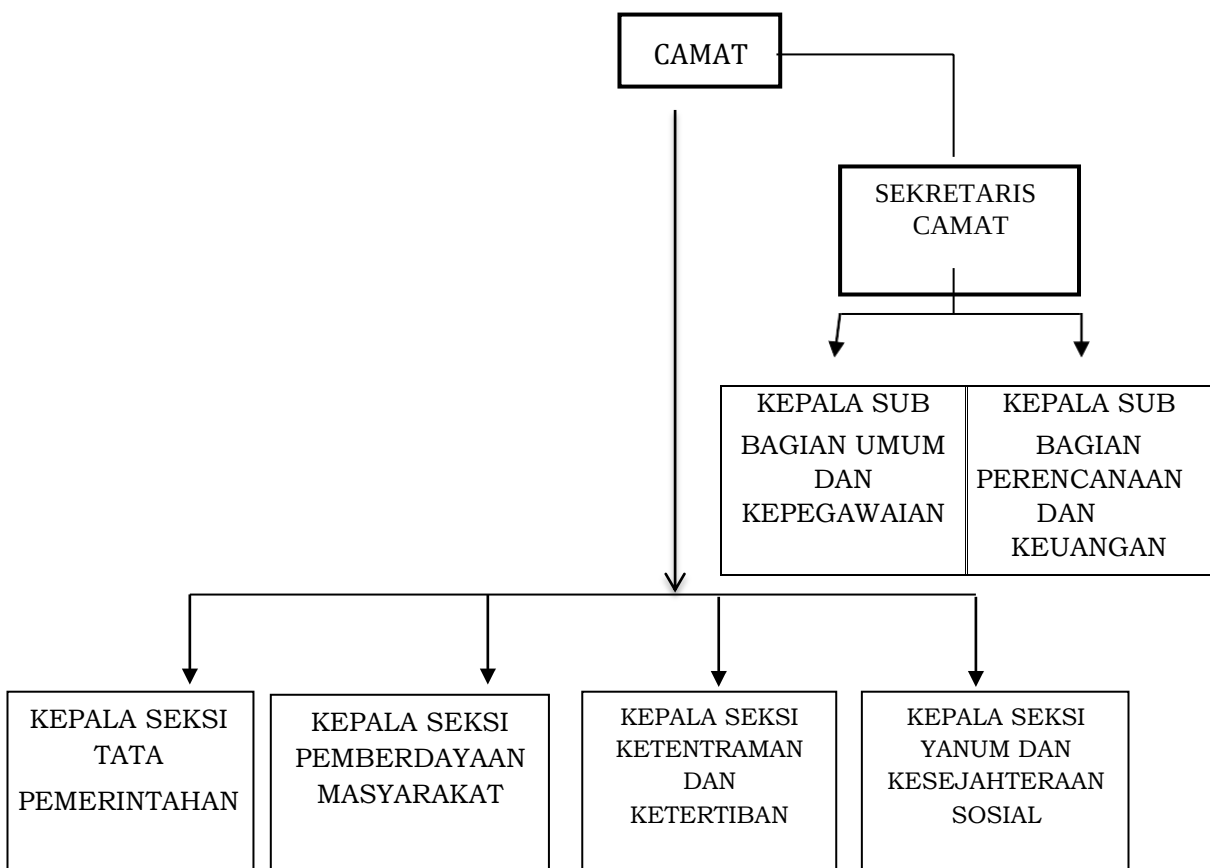
Kecamatan Klirong merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan kecamatan dan kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Klirong dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu

pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan.
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
12. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan Struktur Organisasi berdasarkan Perbup No 86 tahun 2016 Bagan organisasi Kecamatan Klirong dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. 2. Bagan Organisasi Kecamatan Klirong

Struktur organisasi Kecamatan Klirong berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari:

- 1. Camat;
Camat sebagai pimpinan di tingkat kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.
- 2. Sekretariat Kecamatan
Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan,

pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain:

1. pengoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
2. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama;
4. hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
5. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
6. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang- undangan di lingkungan kecamatan;
7. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
8. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
9. pelaksanaan penatausahaan administrasi, dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
10. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
11. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepadamasyarakat di kecamatan;
12. koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

13. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
14. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
15. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan anggaran di lingkungan Kecamatan.
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Tata

Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan;

- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- i. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j. penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- l. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m. penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, koordinasi

dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian

Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

- i. penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- k. penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayahnya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun

swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup kecamatan;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerjabaik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas

- pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya;
- j. penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan

sosial;

- b. melaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Kebumen

Nomor 86 Tahun 2016, Kecamatan Klirong mempunyai fungsi strategis sebagai perangkat daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan Bupati di wilayah kecamatan. Fungsi strategis tersebut menjadi landasan dalam penetapan sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta pengukuran kinerja yang dilaporkan dalam LKjIP Kecamatan Klirong Tahun 2025.

Fungsi strategis Kecamatan Klirong meliputi:

1. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan guna mewujudkan keterpaduan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan desa, serta pelaksanaan pembangunan desa agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penyelenggaraan pelayanan publik dan pelayanan administrasi pemerintahan sesuai kewenangan kecamatan dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.
4. Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan melalui sinergi dengan Forkopimcam, pemerintah desa, dan unsur masyarakat.
5. Fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan melalui mekanisme perencanaan partisipatif serta pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Klirong kepada Bupati.

Fungsi-fungsi strategis tersebut menjadi dasar dalam penyusunan sasaran kinerja Kecamatan Klirong serta pengukuran capaian kinerja yang disajikan dalam LKjIP sebagai wujud penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP).

Adapun sasaran guna mendukung fungsi strategis Kecamatan di atas, antara lain : **Meningkatnya kualitas tata kelola Kecamatan Klirong.**

Indikator yang disusun untuk mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

1. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun
2. Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun
3. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
4. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN;
5. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan;
6. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan;
7. Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan;
8. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan ;
9. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
10. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
11. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan;
12. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan;
13. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan;
14. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
15. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan;
16. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan;
17. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya;
18. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi;
19. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara;
20. Jumlah Mebel yang Dipelihara;

21. Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan;
22. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan;
23. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
24. Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
25. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
26. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
27. Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
28. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;
29. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
30. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

1.3. Permasalahan utama yang dihadapi

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan / kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Kecamatan Klirong sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan unsur kewilayahan. Berikut beberapa permasalahan terkait Layanan Perangkat Daerah Kecamatan Klirong:

Tabel 1. 3. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Klirong

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1.	Belum optimalnya pelayanan kecamatan	Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM di kecamatan klirong	Pendidikan SDM Kecamatan perlu ditingkatkan	Besik akademi ASN perlu ditingkatkan, bisa melalui peningkatan kapasitas ASN
			Perbaikan pola kerja	Pola kerja yang selama ini sudah tidak sesuai perlu diubah
			Sinkronisasi antar pejabat di kecamatan belum maksimal	Koordinasi antar lembaga perlu ditingkat
			Kesadaran Administrasi rendah	Pengelolaan data administrasi pemerintahan masih belum berjalan secara maksimal.
		Kurangnya peran serta masyarakat	Masih rendahnya perekonomian	Belum optimalnya peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan.
			Rendahnya pendidikan	
		Masih minimnya sarana dan prasarana	Sarana IT kurang mendukung	Banyak sarana IT yang rusak
			Sarana dan prasarana pendukung pelayanan masih kurang	Ruang laktasi dan ruang bermain anak belum memadai
			Sarana dan prasarana pendukung pelayanan masih kurang	Banyaknya sarana dalam kondisi rusak

1.4. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Klirong Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026
(Lembaran Berita Daerah Nomor 7 Tahun 2021);

10. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Berita Daerah Nomor 86 Tahun 2016); dan
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 60).

1.5. Sistematika

Cover

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Grafik

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi

1.2. Fungsi Strategis

1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi

1.4. Landasan Hukum

1.5. Sistematika

1.6. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE)

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

1. Rencana Strategis (Renstra)

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

2.2. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.2. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

4.2. Permasalahan/Kendala

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

LAMPIRAN

1.6. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE)

Kecamatan Klirong telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2025 dengan nomor 700/IP.RB/28/2025 tanggal 15 Juli 2025 yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 4. Matriks Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akip Internal

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
1.	Dokumen Pengukuran Kinerja tahun 2024 tidak dipublikasikan, belum diupload di aplikasi semarak	Mempublikasikan pengukuran kinerja tahun 2024 diupload pada aplikasi semarak Kebumen	Telah dipublikasikan pengukuran kinerja tahun 2024 dan diupload pada aplikasi semarak Kebumen	Telah diupload pada link: 2. https://semarak.kebumenkab.go.id/renstra_dokumen/pengukuran_kinerja?menu_id=be525d14-f0e2-4387-a6b0-5d172940ed8f&
2.	Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja belum dibuat	Menyusun Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja secara periodik setiap tahun	Telah disusun Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja secara periodik setiap tahun	Telah diupload pada link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NJFQLbJCBeSoSrL-gga39EDigSuchdif
3.	Belum dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja	Melaksanakan monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang telah disusun	Telah dilaksanakan monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang telah disusun	Telah diupload pada link: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NJFQLbJCBeSoSrL-gga39EDigSuchdif
4.	Belum terdapat mekanisme dan prosedur dalam rangka pengumpulan data kinerja utama (IKM) secara spesifik agar dapat menyajikan data yang valid dan akuntabel	Menyusun mekanisme dan prosedur pengumpulan data kinerja utama (IKM) dalam bentuk SOP secara spesifik, sehingga didapatkan data yang valid dan akuntabel	Telah disusun mekanisme dan prosedur pengumpulan data kinerja utama (IKM) dalam bentuk SOP secara spesifik, sehingga didapatkan data yang valid dan akuntabel	Telah diupload pada link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NJFQLbJCBeSoSrL-gga39EDigSuchdif
5.	Pengukuran Kinerja belum mengukur seluruh kinerja kegiatan Kecamatan, hanya dibuat pada level Camat (IKU) dan belum mencantumkan hambatan dan solusinya	Melaksanakan pengukuran kinerja secara menyeluruh dan berkala (triwulanan), yang membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar / dokumen, serta melampirkan bukti dukung hasil kegiatan yang	Telah dilaksanakan pengukuran kinerja secara menyeluruh dan berkala (triwulanan), yang membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar / dokumen, serta melampirkan bukti dukung hasil	Telah diupload pada link: https://semarak.kebumenkab.go.id/renstra_dokumen/pengukuran_kinerja?menu_id=be525d14-f0e2-4387-a6b0-5d172940ed8f&

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
.		dilaksanakan dalam Upaya mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana aksi perjanjian kinerja, serta melakukan analisis atas permasalahan dan Solusi yang akan dilakukan dalam Upaya mencapai kinerja agar tetap <i>on the track</i> .	kegiatan yang dilaksanakan dalam Upaya mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana aksi perjanjian kinerja, serta melakukan analisis atas permasalahan dan Solusi yang akan dilakukan dalam Upaya mencapai kinerja agar tetap <i>on the track</i> .	
6.	Laporan Monitoring dan evaluasi atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja masih belum dibuat	Menyusun laporan monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	Telah disusun laporan monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	Telah diupload pada link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NJFQLbJCBeSoSrL-gqa39EDigSuchdif
7.	Dokumen Laporan Kinerja dipublikasikan tidak tepat waktu, diupload tanggal 4 Februari 2025 yang seharusnya paling lambat 31 Januari 2025	Laporan Kinerja agar dipublikasikan secara tepat waktu	Surat pernyataan bahwa Laporan Kinerja selanjutnya akan dipublikasikan secara tepat waktu	Telah diupload pada link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NJFQLbJCBeSoSrL-gqa39EDigSuchdif
8.	Laporan Kinerja telah disusun sesuai dengan Perbup No. 60 Tahun 2017, namun belum mencantumkan daftar tabel pada daftar isi	Menyusun dokumen Laporan Kinerja sesuai standar Perbup Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan mencantumkan daftar tabel pada daftar isi	Telah disusun dokumen Laporan Kinerja sesuai standar Perbup Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan mencantumkan daftar tabel pada daftar isi	Telah diupload pada link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NJFQLbJCBeSoSrL-gqa39EDigSuchdif

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
9.	Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan antara realisasi kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, namun perbandingannya kurang lengkap hanya 1 tahun, belum ada perbandingan realisasi IKM tahun-tahun sebelumnya (3 tahun terakhir)	Memperbaiki Laporan Kinerja (LKjIP) Tahun 2024 Bab III dengan menginformasikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi IKM tahun -tahun sebelumnya (3 tahun terakhir)	Telah diperbaiki Laporan Kinerja (LKjIP) Tahun 2024 Bab III dengan menginformasikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi IKM tahun -tahun sebelumnya (3 tahun terakhir)	Telah diupload pada link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NJFQLbJCBeSoSrL-gqa39EDigSuchdif
10.	Strategi peningkatan Kinerja pada Bab IV Penutup belum terdapat langkah strategi di masa mendatang berdasarkan hambatan atau kendala dalam pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya / evaluasi berjalan.	Memperbaiki laporan kinerja (LkjIP) tahun 2024 Bab IV dengan menyajikan langkah strategi di masa mendatang berdasarkan hambatan atau kendala dalam pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya / evaluasi berjalan	Telah diperbaiki laporan kinerja (LkjIP) tahun 2024 Bab IV dengan menyajikan langkah strategi di masa mendatang berdasarkan hambatan atau kendala dalam pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya / evaluasi berjalan	Telah diupload pada link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NJFQLbJCBeSoSrL-gqa39EDigSuchdif
11	Kecamatan Klirong telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2024, namun belum menuangkannya dalam Laporan Kinerja (LkjIP) Kecamatan Klirong Tahun 2024 pada BAB 1 (Pendahuluan)	Menuangkan pelaksanaan tindaklanjut dalam Laporan Kinerja (LkjIP) Kecamatan Klirong Tahun 2024 pada BAB 1 (Pendahuluan)	Menuangkan pelaksanaan tindaklanjut dalam Laporan Kinerja (LkjIP) Kecamatan Klirong Tahun 2024 pada BAB 1 (Pendahuluan)	Telah diupload pada link https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NJFQLbJCBeSoSrL-gqa39EDigSuchdif

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

2.1.1. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Klirong Tahun 2021-2026 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah kedua yang harus dioperasionalisasikan melalui Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dimana dalam berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan dalam mewujudkan Visi, Misi, serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2026. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati untuk pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan.

Pemerintah Kecamatan Klirong sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis sebagai pedoman perencanaan. Rencana Strategis pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi Aparat Pemerintah Kecamatan Klirong tetapi dapat juga sebagai panduan untuk semua pihak yang berkepentingan dalam proses perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Klirong. Rencana Strategis juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Pemerintah Kecamatan Klirong. Dengan telah Rencana Strategis ditetapkan, Kecamatan Klirong sudah mempunyai pedoman dan arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana

pembangunan tahunan.

a. VISI

Kecamatan Klirong memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan terkait dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi. Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”

b. MISI

1) Kebumen semakin **Sejahtera** yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan social ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan,

membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan public.

2) **Mandiri** mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemertaan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

3) **Berakhlak** menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak

hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religious yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang andhap asor, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter

Untuk pencapaian Visi tersebut, maka perlau dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut :

- 1) Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;
- 2) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
- 3) Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- 5) Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Langkah-langkah Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas, perlu dilakukan langkah strategis sebagai berikut :

- 1) Penguatan pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan potensi daerah untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi angka kemiskinan;
- 2) Penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah;
- 3) Penguatan langkah reformasi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak;
- 4) Penguatan reformasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 5) Reformasi di bidang pemerintahan dan pembangunan desa;
- 6) Penguatan perlindungan dan peran perempuan dan anak;
- 7) Penguatan reformasi kebijakan pemberdayaan masyarakat;
- 8) Penguatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
- 9) Penguatan kebijakan penanggulangan resiko bencana

Faktor pendorong terlaksananya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Klirong adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya inovasi manajemen pelayanan di Kecamatan (PATEN) yang menuntuk Kecamatan Klirong lebih mengoptimalkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;
- 2) Transparasi informasi melalui media massa menuntut peran Kecamatan Klirong harus lebih responsife terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
- 3) Keterbukaan informasi publik sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluang Partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan;
- 4) Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh

- mendorong motivasi bekerja ;
- 5) Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur; dan
- 6) Adanya komitmen bersama untuk tidak melakukan tindakan KKN.

Faktor Penghambat:

- 1) Masih adanya seksi yang kekurangan staf;
- 2) Belum meratanya kemampuan IT di semua ASN;
- 3) Masih adanya sumber daya aparatur yang kurang berkompeten, dan
- 4) Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu system yang terpadu, efektif dan efisien.

Tabel 2.1. Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	INDIKATOR URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan <i>e-gov</i> dan <i>open-gov</i> yang terintegrasi	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan

Berdasarkan telaah visi misi Bupati Kebumen Tahun 2021-2026, Kecamatan Klirong sesuai dengan misi Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi, dengan tujuan terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*), serta sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik. Indikator tujuan sasaran disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 2. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Klirong

No.	Tujuan	Sasaran		Indikator	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya reformasi Tata Kela Pemerintahan yang bersih dan baik			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	59,33	61,33	63,33	65,33	67,33	69,33
		1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,50	83,00	84,00	85,00	85,50	86,00
				Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Klirong	Indeks	83,00	84,00	85,00	87,00	88,50	89,00

2.1.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2. 3. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Rumus
	Indikator IKU	
A.	Urusan dan Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	
1.	Urusan Kewilayahan	
a.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	dihitung dengan survei yang dilakukan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen
2.	Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	

No	Indikator	Rumus
A	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kelurahan	dihitung dengan survei yang dilakukan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen
b	Indeks Kondusivitas Kecamatan	jumlah gangguan ketertiban yang ditangani / jumlah gangguan ketertiban x 100%
C	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	jumlah desa dengan indeks desa membangun kategori maju dan mandiri / jumlah desa total x 100%

Berdasarkan Tabel 2.3 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Kecamatan Klirong, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Klirong tahun 2021-2026 difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kecamatan dan Indeks tata kelola Kecamatan Klirong.

2.1.3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

- a. Meningkatnya Perencanaan, Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian
- b. Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang memuaskan
- c. Meningkatnya kondusifitas Kecamatan Klirong
- d. Meningkatnya desa membangun kategori maju dan mandiri

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen adalah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kecamatan. Target Indikator Kinerja Utama Periode 2020-2026 adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.4. Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Kecamatan Klirong Tahun 2025**

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan : Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik									
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	58,40	59,33	61,33	63,33	65,33	67,33	69,33
Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik.									
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kecamatan	Indeks	76,65	84,32	84,65	86,00	87,00	88,50	89,00
2.	Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Indeks	NA	NA	24,05	29,17	34,04	38,08	42,09

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen dari tahun 2025-2029 berupa meningkatnya Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kecamatan Klirong dengan indikator kinerja sasaran berupa Indeks Tata Kelola Kecamatan Klirong yang menargetkan sasaran di tahun 2025 sebesar 100.

2.2. Perjanjian Kinerja

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk Tahun 2025 Kecamatan Klirong Kabupaten

Kebumen telah menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja dengan 1 (satu) sasaran strategis, dimana sasaran strategis itu tertuang dalam indikator kinerja. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama di Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen, sudah mengakomodasi indikator kinerja yang tertuang dalam renstra pendidikan provinsi maupun RPJM Nasional (Renstra Nasional).

Untuk selengkapnya, perjanjian kinerja yang berupa Dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Perubahan II Tahun 2025

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :							
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50
	Sasaran:							
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50
3.	Meningkatnya Desa Membangun	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Prosentase	38,08				79,16

No.	Program	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Keterangan*
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.150.222.000	2.238.269.479	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.138.566.000	65.800.000	APBD
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10.000.000	10.000.000	APBD
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	119.500.000	96.492.005	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan dari kewajiban Kecamatan Klirong untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Klirong Tahun 2025 tergambar dalam tingkat capaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Klirong untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran dan kegiatan yang

dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana direncanakan dalam jangka menengah, maka penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut:

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	≥85% - 100%	Baik
3	≥65 % - 85%	Cukup
4	≥50% - 60 %	Kurang
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang

(Sumber: Self Assestment Tim Penyusun)

Proses penyusunan LKjIP Kecamatan Klirong telah dilaksanakan melalui reviu internal pada tgl 23 Januari 2026 dan diikuti oleh Camat, Sekcam, Kasi, Kasubag, dan staf Kecamatan Klirong.



Gambar 3. 1. Dokumentasi Pelaksanaan Review LkjIP Kecamatan Klirong Tahun 2025

Adapun bukti draft LKjIP sebelum ditetapkan oleh Camat dapat di lihat pada link <https://bit.ly/draftlkjipklirong>

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026, target kinerja Kecamatan Klirong Tahun 2025 sebesar 88,5. Realisasi dihitung berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2025 dengan hasil yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	Kategori	Sumber Data
	Tujuan						
	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,50	91,71	107,26	Sangat Baik	Survey Kepuasan Masyarakat
	Sasaran						
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Klirong	88,5	92,09	104,06%	Sangat Baik	Survey Kepuasan Masyarakat
2.	Meningkatnya Desa Membangun di Kecamatan Klirong	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri di Kecamatan Klirong	38,08	79,16	208,3	Sangat Baik	SK Mendes 343 Status Desa

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Kecamatan Klirong Tahun 2025 mencapai 104,06% yang artinya masuk dalam kategori Baik Sekali (BS). Data

diperoleh dari survey kepuasan masyarakat yang diperoleh dari website <https://skm.kebumenkab.go.id/Ikm> dengan responden sejumlah 2327 orang dengan kategori lulusan SD, SMP, SMA, Diploma, S1, S2/S3, dan lainnya. Realisasi IKM Tahun 2025 diperoleh dari rata-rata IKM tiap Triwulan.

Adapun Realisasi tiap triwulan di tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3. 2. Realisasi IKM Kecamatan Klirong Triwulan I s,d IV Tahun 2025

Realisasi IKM Tahun 2025 sebesar 92,09 merupakan rata-rata dari IKM triwulan I sampai dengan IV yaitu sebesar 91,06 di triwulan I dengan responden sejumlah 459 orang, sebesar 91,64 di triwulan II dengan responden sejumlah 376 orang, sebesar 92,21 di triwulan III dengan responden sejumlah 1.087 orang, dan 93,43 di triwulan IV dengan responden sejumlah 405 orang.

Dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 92,09 dan berada pada kategori sangat baik,

No	Unsur Pelayanan	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Persyaratan	95,03	91,74	91,16	93,64
2	Prosedur	95,13	91,79	91,04	93,63
3	Waktu Pelayanan	88,77	91,59	91,25	93,64
4	Biaya/Tarif	100	99,89	99,73	100
5	Produk Layanan	88,85	91,73	91,64	93,69
6	Kompetensi Pelaksana	88,85	91,52	91,05	93,64
7	Perilaku Pelaksana	89,08	91,6	91,16	93,69
8	Sarana dan Prasarana	88,6	91,58	91,55	93,58
9	Penanganan Pengaduan	93,49	91,63	99,68	93,85
JUMLAH		827,79	833,08	838,26	849,35
IKM		91,06	91,64	92,21	93,43

pelayanan publik di Kecamatan Klirong memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pencapaian Sasaran Strategis peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana tertuang

dalam Renstra dan LKjIP Kecamatan Klirong.

Tingginya nilai IKM menunjukkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan telah tercapai dan melampaui standar kinerja yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan bahwa proses pelayanan telah berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel, serta sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Capaian tersebut berdampak pada meningkatnya kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam mengakses layanan pemerintahan, meningkatnya ketertiban administrasi, serta berkurangnya keluhan pelayanan. Selain itu, pelayanan yang cepat, jelas, dan nyaman turut mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Kecamatan Klirong.

Secara keseluruhan, capaian IKM yang tinggi menjadi indikator keberhasilan Kecamatan Klirong dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan menjadi dasar yang kuat untuk mempertahankan serta meningkatkan kualitas pelayanan pada periode berikutnya.

Indeks desa membangun Kecamatan Klirong diperoleh dari jumlah desa dengan kategori maju dan mandiri di Kecamatan Klirong dibandingkan dengan jumlah desa di Kecamatan Klirong. Kecamatan Klirong memiliki desa dengan kategori maju dan mandiri sejumlah 19 desa dibagi jumlah desa di Kecamatan Klirong sejumlah 24 desa. Sedangkan realisasi Indeks Desa Membangun Kecamatan Klirong adalah sebesar 79,16% dengan capaian kinerja sebesar 208,3% artinya sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Klirong sebagian besar merupakan Desa maju dan Mandiri.

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

Capaian kinerja tidak hanya dilihat pada realisasi tahun berjalan, tetapi juga diukur dan dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya. Berikut adalah capaian kinerja tahun 2023-2025 di Kecamatan Klirong.

Tabel 3. 3. Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Sasaran	Indikator Perangkat Daerah	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Klirong	85,00	86,96	102,31	87,00	90,13	103.60	88,50	92,09	100,21
2.	Meningkatnya Desa Membangun di Kecamatan Klirong	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri di Kecamatan Klirong	29,17	29,17	100	34,04	34,04	100	38,08	79,16	208,3

(Sumber : Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen, 2025)

Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik diukur melalui Indikator Kinerja berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Klirong. Selama periode tahun 2023–2025, capaian IKM menunjukkan kinerja yang konsisten melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023, realisasi IKM sebesar 86,96 dari target 85,00 atau mencapai 102,31%. Pada tahun 2024, realisasi meningkat menjadi 90,13 dari target 87,00 dengan capaian kinerja sebesar 103,60%.

Pada tahun 2025, meskipun target IKM ditingkatkan menjadi 88,50, Kecamatan Klirong tetap mampu merealisasikan IKM sebesar 92,09 atau mencapai 100,21%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik berada pada kategori sangat baik dan sasaran strategis telah tercapai. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen Kecamatan Klirong dalam meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Akhir Renstra 2021-2026

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen penting untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Melalui perbandingan ini dapat diketahui sejauh

mana kinerja yang telah dicapai mampu memenuhi target yang direncanakan, sekaligus menjadi dasar evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan.

Tabel 3. 4. Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Sasaran Strategis

N o	Sasaran	Indikator Perangkat Daerah	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Klirong	89	92,09	103,47%
2.	Meningkatnya Desa Membangun di Kecamatan Klirong	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri di Kecamatan Klirong	42,09	79,16	188,07%

Berdasarkan tabel di atas, target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 89. Sampai dengan tahun 2025, realisasi mencapai 103,47% artinya termasuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan hasil perbandingan antara realisasi kinerja dan target Renstra pada setiap tahun, terlihat adanya tren capaian kinerja yang positif dan konsisten melampaui target yang telah ditetapkan. Selisih antara realisasi dengan target menunjukkan nilai yang semakin baik dari tahun ke tahun, yang menandakan bahwa strategi, program, dan kegiatan yang dilaksanakan telah berjalan efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis.

Pada tahun 2023, realisasi kinerja telah melampaui target Renstra dengan selisih positif, yang kemudian diperkuat pada tahun 2024 dengan peningkatan capaian yang lebih tinggi dibandingkan target tahun berjalan. Pada tahun 2025, meskipun target Renstra ditingkatkan, realisasi kinerja tetap berada di atas target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan target tidak menurunkan kinerja, melainkan justru diikuti oleh peningkatan kualitas pelaksanaan pelayanan.

Dengan mempertimbangkan tren capaian tersebut serta konsistensi realisasi yang selalu berada di atas

target Renstra tahunan, dapat disimpulkan bahwa target akhir Renstra berpotensi besar untuk tercapai, bahkan berpeluang melampaui target yang ditetapkan. Optimisme ini didukung oleh komitmen aparatur, perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pelayanan, serta meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kecamatan Klirong. Ke depan, upaya penguatan kualitas pelayanan dan pengendalian kinerja akan terus dilakukan guna memastikan keberlanjutan capaian hingga akhir periode Renstra.

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kabupaten

Tabel berikut menyajikan capaian kinerja Kecamatan Klirong tahun 2025 pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat dan dibandingkan dengan Standar Kabupaten.

Tabel 3.5. Perbandingan Capaian dengan Standar Kabupaten

No	Sasaran	Indikator	Stndar Kabupaten	Realisasi 2025	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Klirong	85,5	92,09	107,71%
2.	Meningkatnya Desa Membangun di Kecamatan Klirong	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri di Kecamatan Klirong	NA	79,16	NA

Berdasarkan data di atas, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Klirong pada tahun 2025 sebesar 92,09, telah melampaui Standar Kabupaten sebesar 85,5, dengan tingkat capaian 107,71%. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kecamatan Klirong berada di atas standar yang

ditetapkan, mencerminkan kinerja pelayanan yang sangat baik serta tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi. Capaian tersebut menjadi indikator keberhasilan kecamatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan perlu dipertahankan secara berkelanjutan.

Sedangkan Perbandingan Perkembangan Realisasi IKM Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen dengan IKM Kecamatan di sekitar yaitu Kecamatan Petanahan, Bulus Pesantren, dan Puring dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 6. Perbandingan IKM Kecamatan Petanahan, Kecamatan Klirong, Kecamatan Bulus Pesantren, dan Kecamatan Puring

Unsur Pelayanan	KECAMATAN			
	Petanahan	Klirong	Buluspesantren	Puring
Persyaratan	92,41	92,89	94,26	91,47
Prosedur	90,99	92,90	92,41	91,56
Waktu Pelayanan	89,61	91,31	86,60	90,36
Biaya/Tarif	99,88	99,91	99,89	98,55
Produk Layanan	91,03	91,48	94,86	92,29
Kompetensi Pelaksana	89,82	91,27	92,92	92,44
Perilaku Pelaksana	89,59	91,38	96,45	92,14
Sarana dan Prasarana	89,70	91,33	90,30	92,22
Penanganan Pengaduan	99,57	94,66	95,88	99,16
Indeks Kepuasan Masyarakat	91,59	92,09	92,79	92,42

IKM Kecamatan Klirong sebesar 92,09 pada tahun 2025 lebih rendah jika dibandingkan dengan Kecamatan Puring dan Kecamatan Buluspesantren, namun jika dibandingkan dengan Kecamatan Petanahan lebih tinggi sebesar 0,5%. Artinya Kecamatan Klirong masih dalam batas aman jika dibandingkan dengan Kecamatan di sekitarnya.

Dari 9 Unsur Pelayanan dalam Indeks Kepuasan Masyarakat terdapat 3 unsur yang masih rendah yaitu, Unsur Kompetensi Pelaksana, Unsur Waktu Pelayanan, dan Unsur Sarana dan Prasarana. Adapun rencana tindak lanjut masing-masing unsur yang perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Unsur Kompetensi Pelaksana tindak lanjut

perbaikannya adalah mengirimkan pelaksana untuk peningkatan kapasitas seperti bimbingan teknik dan pelatihan - pelatihan IT khususnya pelayanan publik.

- 2. Unsur Waktu Pelayanan rencana tindak lanjut perbaikannya adalah mempublikasi dan memampang waktu pelayanan di ruang pelayanan publik dan melalui website, media sosial (facebook, instagram, twitter).
- 3. Unsur Sarana dan Prasarana rencana tindak lanjut perbaikannya adalah pada tahun 2026 akan ditambahkan Sarana dan Prasarana yang menunjang kegiatan paten contohnya akan dilakukan pengadaan Alat Peraga Mainan dan beberapa mainan tambahan anak untuk kenyamanan masyarakat.

Sedangkan perbandingan Indeks desa membangun Kecamatan Klirong dibandingkan dengan kecamatan lain di sekitar yaitu Kecamatan Petanahan, Kecamatan Puring dan Buluspesantren sebagai berikut:

No	Petanahan	Klirong	Puring	Buluspesantren
1	100%	79,16%	95,65%	100%

Indeks desa membangun Kecamatan Klirong dibandingkan dengan Kecamatan lain di sekitarnya memiliki nilai realisasi paling rendah yaitu sebesar 79,16% namun jika dibandingkan dengan target yang dibuat pada renstra tahun 2021-2026 sudah memiliki capaian sebesar 208,3 %. Dengan demikian artinya Kecamatan Klirong walaupun masih memiliki desa dengan kategori berkembang tetapi sudah melebihi target yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Klirong.

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan /Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kinerja pelayanan publik di Kecamatan Klirong mengalami peningkatan setiap tahun dan selalu melampaui target Renstra. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam pengelolaan layanan dan peningkatan

kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berikut adalah analisis terhadap faktor pendukung peningkatan kinerja Kecamatan Klirong Tahun 2025.

Tabel 3.7. Analisis Keberhasilan dan Upaya yang dilakukan untuk Mencapai Target di Masa yang akan Datang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja	Analisis Keberhasilan	Upaya yang dilakukan untuk Mencapai Target di Masa yang akan Datang
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Klirong	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Klirong	85,50	92,09	107,71	Capaian Indeks Kepuasan yang mencapai target	Pelayanan prima, peningkatan kedisiplinan, penerapan budaya kerja responsif.
						Unsur prosedur memperoleh nilai sangat baik, mencerminkan bahwa alur pelayanan sudah sederhana, transparan, dan mudah diikuti . Keberhasilan ini menunjukkan konsistensi aparatur dalam menjalankan SOP pelayanan serta meminimalkan tahapan yang berpotensi menimbulkan kebingungan bagi masyarakat.	Memperkuat penerapan dan evaluasi SOP pelayanan secara berkala guna memastikan alur pelayanan tetap sederhana, transparan, dan konsisten dilaksanakan oleh seluruh aparatur pelayanan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja	Analisis Keberhasilan	Upaya yang dilakukan untuk Mencapai Target di Masa yang akan Datang
						Unsur biaya/tarif memperoleh nilai sangat tinggi , yang menunjukkan keberhasilan Kecamatan Klirong dalam menerapkan prinsip pelayanan gratis dan bebas pungutan liar . Transparansi biaya serta kepastian bahwa layanan tidak dipungut biaya menjadi faktor utama meningkatnya kepercayaan masyarakat	Menjaga komitmen pelayanan bebas biaya dengan meningkatkan transparansi informasi tarif pelayanan serta pengawasan internal guna mencegah praktik pungutan di luar ketentuan yang berlaku.
						Nilai tinggi pada unsur ini menunjukkan keberhasilan Kecamatan Klirong dalam menyediakan mekanisme pengaduan yang jelas dan responsif . Setiap keluhan masyarakat ditangani dengan cepat dan ditindaklanjuti secara nyata, sehingga meningkatkan rasa keadilan dan kepercayaan publik.	Mengoptimalkan sistem pengaduan masyarakat dengan memastikan ketersediaan kanal pengaduan yang jelas, mudah diakses, serta menindaklanjuti setiap pengaduan secara cepat dan transparan sebagai bahan perbaikan pelayanan
						Inovasi yang ada	Kecamatan Klirong menerapkan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun)
2.	Meningkatnya Desa Membangun di Kecamatan Klirong	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri di Kecamatan	38,08%	79,16%	208,3%	Peningkatan status desa ke arah yang lebih maju dan mandiri. Keberhasilan ini menjadi indikator positif bahwa pembangunan desa di	Penguatan pembinaan desa secara berkelanjutan, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta optimalisasi program pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan lingkungan agar seluruh

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja	Analisis Keberhasilan	Upaya yang dilakukan untuk Mencapai Target di Masa yang akan Datang
		Klirong				Kecamatan Klirong telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional.	desa dapat mencapai status yang lebih tinggi secara merata.

Adanya peningkatan IKM dan IDM Kecamatan Klirong menunjukkan bahwa upaya perbaikan pelayanan publik berjalan efektif, didukung oleh beberapa faktor diatas. Namun, disamping keberhasilan pencapaian target, terdapat potensi tantangan yang dapat menghambat, antara lain:

1. Unsur Kompetensi Pelaksana

Peningkatan kapasitas melalui bimtek dan pelatihan IT berpotensi terkendala oleh keterbatasan anggaran, waktu pelaksanaan pelatihan, serta beban kerja pelayanan harian, sehingga tidak seluruh pelaksana dapat mengikuti kegiatan secara optimal dan merata.

2. Unsur Waktu Pelayanan

Publikasi standar waktu pelayanan berpotensi menghadapi tantangan berupa ketidaksesuaian antara standar waktu yang dipublikasikan dengan kondisi pelayanan di lapangan, serta keterbatasan dalam pemutakhiran informasi pada website dan media sosial secara berkelanjutan.

3. Unsur Sarana dan Prasarana

Penambahan sarana dan prasarana penunjang pelayanan berpotensi terkendala oleh keterbatasan anggaran,

ruang pelayanan, serta kebutuhan pemeliharaan fasilitas, sehingga diperlukan pengelolaan yang berkelanjutan agar sarana tetap layak dan nyaman digunakan.

3.1.6. Analisis atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Efisiensi Anggaran secara lebih rinci dapat dilihat dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dari laporan kinerja, sedangkan efisien anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 8. Analisis atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Tingkat Efisiensi
Tujuan							
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	85,50	91,71	107,26%				
Sasaran							
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	88,50	92,09	104,06%	2.410.561.484	1.921.307.477	79,70 %	24,36%
Meningkatnya Desa Membangun di Kecamatan Klirong	38,08	79,16	208,3%	2.410.561.484	1.921.307.477	79,70 %	128,6%

Anggaran Kecamatan Klirong hanya terserap sebesar 79,70%, hal ini karena anggaran untuk gaji dan tunjangan hanya terserap 76% disebabkan karena anggaran tunjangan Gaji pegawai Kecamatan Klirong terlalu besar, disamping terdapat kekosongan Kasi Tapem dan Kasi PM, sedangkan Kasi Kesospun baru terisi di Bulan Oktober Tahun 2025. Namun dengan anggaran yang hanya terserap 79,70% capaian kinerja Kecamatan Klirong 104,06% dari sisi IKM dan 208,3% dari sisi IDM artinya Kecamatan Klirong telah melakukan efesiensi anggaran sebesar 24,36% dari sisi IKM dan 128,6% dari sisi IDM yang dapat diartikan bahwa sebaiknya anggaran Kecamatan Klirong dari sisi gaji dan tunjangan seharusnya dikurangi agar sesuai dengan jumlah karyawan yang tersedia.

3.1.6.1. Analisis Penggunaan Sumber Daya Manusia

Berikut tabel perbandingan kebutuhan SDM dengan realisasi pegawai Kecamatan Klirong Tahun 2025

Tabel 2.6. Perbandingan Kebutuhan SDM dengan Realisasi Tahun 2025

No	Nama Jabatan	Eselon	Kebutuhan	Realisasi
1	Camat	III a	1	1
2	Sekretaris Kecamatan	III b	1	1
3	Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan	IV b	1	1
4	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	IV b	1	1
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	-	1	-
6	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	IV a	1	1
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	-	1	-
8	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	IV a	1	1
9	Perencana Ahli Pertama	-	1	1
10	Pengadmistrasi Kependudukan	-	3	1
11	Pengadministrasi Umum	-	3	3
12	Penggerak Swadaya Masyarakat	-	1	1
13	Arsiparis Terampil	-	1	1
Jumlah			17	13
Capaian				76,47%

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dengan realisasi SDM 76,47% realisasi kinerja 104,06% dapat disimpulkan penggunaan SDM efisien. Namun demikian untuk mencapai kinerja yang akan datang perlu menambah SDM sesuai dengan kebutuhan diantaranya terdapat dua kasi yang belum tersedia yaitu Kasi Tata Pemerintahan dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat.

3.1.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berikut tabel keterkaitan sasaran program/kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Kecamatan Klirong Tahun 2025:

Tabel 3.9. Keterkaitan Sasaran dan Program/ Kegiatan Pendukung

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
Tujuan						
Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	107,26%				
Sasaran						
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Klirong	104,06%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
			Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	Menunjang

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	104,06%	Menunjang

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat	Jumlah Urusan Pemerintahan yang di limpahkan kepada Camat	100%	Menunjang
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%	Menunjang
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	Menunjang
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Menunjang
			Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Menunjang
Rata-rata					100,31%	Menunjang

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program Kegiatan pada Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen

Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa dari 4 (Empat) Program dan 9 (Sembilan) Kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja 100,31% dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang ada pada Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen telah berhasil menunjang tercapainya sasaran kinerja.

3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebesar Rp2.410.561.484,- terdiri dari 4 program dan 9 kegiatan. Berikut kami sajikan realisasi anggaran tahun 2025 yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen yang telah ditetapkan:

Tabel 3. 10. Realisasi Anggaran Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2025

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	realisasi	%	Lebih/ kurang
1	2	3	4	5	6
7.1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.443.814.479	1.949.203.680	79,76%	494.610.799
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000	7.378.360	98,38%	121.640
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.500.000	4.399.000	97,76%	101.000
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	2.979.360	99,31%	20.640
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.024.702.030	1.545.357.250	76,33%	479.344.780
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.997.555.000	1.518.241.250	76,00%	479.313.750
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	27.147.030	27.116.000	99,89%	31.030
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	53.542.449	53.262.400	99,48%	280.049
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.595.310	3.595.000	99,99%	310
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.200.000	23.200.000	100,00%	-
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.000.000	9.000.000	100,00%	-
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	2.500.000	2.500.000	100,00%	-
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	8.514.405	8.439.000	99,11%	75.405
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.150.000	2.949.400	93,63%	200.600
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.582.734	3.579.000	99,90%	3.734
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik	41.000.000	38.935.000	94,96%	2.065.000

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	realisasi	%	Lebih/kurang
1	2	3	4	5	6
	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000	33.545.000	95,84%	1.455.000
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000	5.390.000	89,83%	610.000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.800.000	52.153.770	91,82%	4.646.230
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.496.000	99,73%	4.000
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000	20.360.170	81,44%	4.639.830
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.300.000	30.297.600	99,99%	2.400
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260.270.000	252.116.900	96,87%	8.153.100
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.000.000	31.673.550	98,98%	326.450
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	2.000.000	2.000.000	100,00 %	-
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.725.000	10.725.000	100,00%	-
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000	100,00%	-
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	65.800.000	63.678.517	96,78%	2.121.483
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	65.800.000	63.678.517	96,78%	2.121.483
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	60.800.000	58.718.517	96,58%	2.081.483
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.000.000	4.960.000	99,20%	40.000
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	10.000.000	9.989.000	99,89%	11.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.000.000	9.989.000	99,89%	11.000
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	10.000.000	9.989.000	99,89%	11.000
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	225.246.005	127.827.000	99%	927.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	128.754.000	96.154.600	74,68%	32.599.400

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	realisasi	%	Lebih/kurang
1	2	3	4	5	6
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	17.897.700	17.725.100	99,00%	172.600
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12.500.000	12.480.000	98,00%	20.000
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.000.000	5.997.000	100,00%	3.000
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	24.560.805	24.473.500	99,00%	87.305
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	29.533.500	29.482.500	100,00%	51.000
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6.000.000	5.996.500	100,00%	3.500
Jumlah		2.410.561.484	1.921.307.447	79,70%	489.254.037

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa capaian realisasi sebesar 79,70%. Hal ini menunjukkan realisasi kinerja yang baik. Capaian dari total Sembilan kegiatan, ada delapan kegiatan yang mencapai realisasi di atas 90%, sedangkan terdapat satu kegiatan di bawah 90% pada sub Penyediaan Gaji. Hal ini dikarenakan ada jabatan kosong yang belum terisi hingga akhir tahun sehingga penyerapan anggaran gaji tidak maksimal.

BAB IV PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Secara umum, capaian kinerja Kecamatan Klirong Tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup optimal dan berada pada jalur yang sesuai dengan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Mayoritas Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat direalisasikan sesuai target, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan, pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa, serta koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Capaian tersebut merupakan hasil dari konsistensi penerapan manajemen kinerja berbasis hasil (*result based management*), perencanaan yang mengacu pada dokumen Renstra dan Renja Kecamatan Klirong, serta dukungan koordinasi internal dan eksternal. Selain itu, komitmen aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan turut mendukung pencapaian kinerja organisasi.

Meskipun demikian, terdapat beberapa IKU yang realisasinya belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan sumber daya dan pengaruh faktor eksternal. Kondisi ini menjadi dasar evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

4.2 Permasalahan/Kendala

Dalam pelaksanaan kinerja Kecamatan Klirong Tahun 2025, masih dijumpai beberapa permasalahan dan kendala yang mempengaruhi pencapaian Sasaran Strategis, antara lain:

1. Unsur Kompetensi Pelaksana

Peningkatan kapasitas melalui bimtek dan pelatihan IT berpotensi terkendala oleh keterbatasan anggaran, waktu pelaksanaan pelatihan, serta beban kerja pelayanan harian, sehingga tidak seluruh pelaksana dapat mengikuti kegiatan secara optimal dan merata.

2. Unsur Waktu Pelayanan

Publikasi standar waktu pelayanan berpotensi menghadapi tantangan berupa ketidaksesuaian antara standar waktu yang dipublikasikan dengan kondisi pelayanan di lapangan, serta keterbatasan dalam pemutakhiran informasi pada website dan media sosial secara berkelanjutan.

3. Unsur Sarana dan Prasarana

Penambahan sarana dan prasarana penunjang pelayanan berpotensi terkendala oleh keterbatasan anggaran, ruang pelayanan, serta kebutuhan pemeliharaan fasilitas, sehingga diperlukan pengelolaan yang berkelanjutan agar sarana tetap layak dan nyaman digunakan.

4.3 Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik serta mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kecamatan Klirong di masa mendatang, strategi peningkatan kinerja diarahkan pada upaya perbaikan yang terfokus dan berkelanjutan, sebagai berikut:

1. Peningkatan Kompetensi Pelaksana

Mendorong peningkatan kapasitas aparatur pelayanan melalui perencanaan pelatihan yang lebih terarah dan bertahap, dengan memprioritaskan pelatihan teknologi informasi dan pelayanan publik. Strategi ini dilaksanakan melalui pengaturan jadwal pelatihan yang menyesuaikan beban kerja pelayanan, optimalisasi anggaran, serta penerapan mekanisme berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*) bagi aparatur yang telah mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan.

2. Peningkatan Ketepatan Waktu Pelayanan

Memperkuat manajemen waktu pelayanan dengan melakukan evaluasi berkala terhadap standar waktu

pelayanan agar tetap realistis dan sesuai dengan kondisi lapangan. Selain itu, dilakukan optimalisasi pemanfaatan website dan media sosial sebagai sarana publikasi informasi pelayanan yang akurat dan mutakhir, disertai penunjukan petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap pemutakhiran informasi pelayanan.

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah. Strategi ini didukung dengan pengaturan tata ruang pelayanan yang lebih efisien serta peningkatan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas secara rutin guna menjamin kenyamanan, keamanan, dan keberlanjutan fungsi sarana pelayanan publik.

Dengan pelaksanaan strategi tersebut, diharapkan kinerja Kecamatan Klirong pada tahun-tahun mendatang dapat semakin efektif, efisien, dan akuntabel, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 30 Januari 2026

Camat Klirong
Kabupaten Kebumen

TELAH DITELITI DAN DIVERIFIKASI	NAMA	PARAF
	<u>Yahya H</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>Sri P</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>Basiki</u>	<u>[Signature]</u>
	<u>Safiatun</u>	<u>[Signature]</u>
NOMOR :	<u>Moh. Afand</u>	<u>[Signature]</u>



Eko Purwanto, S.STP. M.S.i
Pembina Tingkat I/IVb
NIP. 197901161998101001

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KLIRONG

Jalan Klegenwonosari Nomor – Alamat Klirong, Kodepos 54381, Telepon - ,
Faksimile -, email : kecamatanklirong@gmail.com,
website : kec-klirong.kebumenkab.go.id , Pos-el -

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Eko Purwanto,S.STP.,M.Si
Jabatan : Camat Klirong
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. LILIS NURYANI
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

LILIS NURYANI

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Eko Purwanto,S.STP.,M.Si
Pembina Tk.I/ IV B
NIP. 197901161998101001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN**

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Triwulan			
					I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :							
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,50	85,50	85,50	85,50	85,50
	Sasaran:							
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks	88,50	88,50	88,50	88,50	88,50

No.	Program	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Keterangan*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.150.222.000	Rp 2.238.269.479	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 1.138.566.000	Rp. 65.800.000	APBD
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	APBD
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 119.500.000	Rp 96.492.005	APBD

Kebumen, 28 Agustus 2025

Bupati Kebumen

Camat Klirong
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

LILIS NURYANI



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Eko Purwanto, S.STP., M.Si
Pembina Tk. I / IV B
NIP. 197901161998101001

**RENCANA KINERJA PERUBAHAN TAHUNAN
KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025**

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Tujuan :		
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	89
	Sasaran:		
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik oleh Kecamatan	89

Kebumen, 28 Agustus 2025

Camat Klirong Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Eko Purwanto, S.STP., M.Si
Pembina Tk. I / IV B
NIP. 197901161998101001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MOH. AFANDI,S.H

Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN KLIRONG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : EKO PURWANTO, S.STP., M.Si

Jabatan : CAMAT KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



EKO PURWANTO, S.STP., M.Si
NIP.197901161998101001

Kebumen, 26 Juni 2025

Pihak Pertama

MOH.AFANDI,S.H.
NIP. 197209161994021003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS CAMAT KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Terlaksananya Evaluasi Perangkat Daerah (Renstra, RKA, Renja, DPA, LKjIP, SAKIP, RKAP, DPPA)	2 Sub Keg. 9 Dok.	4 dok	0 dok	2 dok	3 dok
2.	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	2 Sub Keg. 12 Bulan 15 Orang	3 bln	3 bln	3 bln	3 bln
3.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	7 Sub Keg. 12 Bulan	3 bln	3 bln	3 bln	3 bln
4.	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Sub Keg. 18 Unit		18 Unit		
5.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Sub Keg. 12 Bulan	3 bln	3 bln	3 bln	3 bln

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Sub Keg. 37 Unit	4 unit	12 Unit	14 Unit	7 Unit
7.	Terselenggaranya kegiatan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan	2 Sub Keg 9 laporan	1 Laporan	1 Laporan	6 Laporan	1 Laporan
8.	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	1 Sub Keg 2 Keg			2 Keg	
9.	Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terbinanya dan Terawasinya Pemerintahan Desa	6 Sub Keg. 24 Desa	24 Desa	24 Desa	24 Desa	24 Desa
a.	Terlaksananya fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan Aset Desa	Tersedianya dokumen fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan Aset Desa	24 Dokumen	6 dokumen	6 dokmen	6 dokumen	6 dokumen

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
b.	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Tersedianya Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	-
c.	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Dokumen Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 dokumen			1 dokumen	
d.	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Tersedianya Dokumen Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2 dokumen				2 Dokumen
e.	Terlaksananya fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Tersedianya dokumen fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
f.	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Tersedianya Dokumen Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	

NO	PROGRAM	PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	SUBKEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota/ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	7.500.000	7.500.000	2 Sub Kegiatan
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.855.856.244	2.024.702.030	2 Sub Kegiatan
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota/ Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.764.000	53.542.449	7 Sub Kegiatan
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	41.000.000	41.000.000	2 Sub Kegiatan
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.500.000	56.800.000	3 Sub Kegiatan
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.725.000	54.725.000	4 Sub Kegiatan
7	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik/ Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.196.022.000	65.800.000	2 Sub Kegiatan
8	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum/ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	10.000.000	10.000.000	1 Sub Kegiatan
9	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/ Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	119.500.000	96.492.005	6 Sub Kegiatan
	Jumlah : 4 Program/9 Kegiatan	3.398.867.244	2.410.561.484	28 Sub Kegiatan

CAMAT KLIRONG



(EKO PURWANTO, S.STP.,M.Si)

NIP.197901161998101001

Kebumen, 26 Juni 2025

SEKRETARIS KECAMATAN

(MOH. AFANDI,S.H)

NIP. 197209161994021003



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KLIRONG
Jalan : Klegenwonosari No.- Telp. – Klirong 54381

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SRI PURWANTI, S.Sos

Jabatan : KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : MOH.AFANDI,S.H

Jabatan : SEKRETARIS CAMAT KLIRONG

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 26 Juni 2025
Pihak Pertama

Pihak Kedua



MOH.AFANDI,S.H.
NIP.197209161994021003

SRI PURWANTI, S.Sos
NIP.197001231990032003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025
KASUBAG PERENCANAAN & KEUANGAN PADA KECAMATAN KLIRONG

NO.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Terlaksananya Evaluasi Perangkat Daerah (Renstra, RKA, Renja, DPA, LKjIP, SAKIP, RKAP, DPPA)	2 Sub Keg. 9 Dok.	4 dok	0 dok	2 dok	3 dok
2.	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	2 Sub Keg. 12 Bulan 15 Orang	3 bln	3 bln	3 bln	3 bln

NO.	Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	Keterangan*
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Penyusunan Dokumen Perencanaan	4.500.000	4.500.000	5 Dokumen
2	Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	3.000.000	4 Dokumen
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.824.989.244	1.997.555.000	15 orang
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.867.000	27.147.030	3 Dokumen
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000	35.000.000	1 Unit
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.000.000	6.000.000	1 Unit
	Jumlah: 3 Kegiatan/ 6 Sub Kegiatan	1.904.356.244	2.073.202.030	

Kebumen, 26 Juni 2025

SEKRETARIS CAMAT


(MOH.AFANDI, S.H)
NIP. 197209161994021003

KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN


(SRI PURWANTI, S.Sos)
NIP. 197001231990032003

Mengetahui,
CAMAT


(EKO PURWANTO, S.STP., M.Si)
NIP. 197901161998101001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KLIRONG
Jalan : Klegenwonosari No.- Telp. – Klirong 54381

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : BASITI, S.Sos

Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : MOH.AFANDI,S.H

Jabatan : SEKRETARIS CAMAT KLIRONG

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 26 Juni 2025

Pihak Pertama

Pihak Kedua



MOH.AFANDI,S.H.

NIP. 197209161994021003

BASITI, S.Sos

NIP.19720408 199303 2 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA KECAMATAN KLIRONG

NO.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi umum perangkat daerah	7 Sub Keg. 12 Bulan	3 bln	3 bln	3 bln	3 bln
2.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Sub Keg. 12 Bulan	3 bln	3 bln	3 bln	3 bln
3.	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Sub Keg 37 Unit	4 Unit	12 Unit	14 Unit	7 Unit

NO	PROGRAM	PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	SUBKEGIATAN
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah/Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	3.595.310	4 Paket
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah/Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.000.000	23.200.000	2 Paket
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.000.000	9.000.000	2 Paket
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000	2.500.000	2 Dokumen
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyediaan Bahan/Material	9.264.000	8.514.405	3 Paket
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000	3.150.000	6 Laporan
7	Administrasi Umum Perangkat Daerah/ Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.000.000	3.582.734	19 Dokumen
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	12 Laporan
9	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000	25.000.000	12 Laporan
10	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.000.000	30.300.000	12 Laporan
11	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.000.000	32.000.000	14 Unit

NO	PROGRAM	PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	SUBKEGIATAN
12	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan Mebel	2.000.000	2.000.000	5 Unit
13	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	10.725.000	10.725.000	15 Unit
14	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000	10.000.000	3 Unit
Jumlah: 3 Kegiatan/ 14 Sub Kegiatan		168.989.000	165.067.449	

Kebumen, 26 Juni 2025

SEKRETARIS CAMAT


(MOH.AFANDI,S.H.)
NIP. 197209161994021003

KASUBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN


(BASITI, S.Sos)
NIP.197204081993032004

Mengetahui,
CAMAT


(EKO PURWANTO, S.STP., M.Si)
NIP. 197901161998101001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KLIRONG
Jalan : Klegenwonosari No.- Telp. – Klirong 54381

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : YAKIRUN

Jabatan : PLT. KASI PELAYANAN UMUM DAN KESOS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : EKO PURWANTO, S.STP., M.Si

Jabatan : CAMAT KLIRONG

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 26 Juni 2025

Pihak Pertama

YAKIRUN

NIP.197611291997031001

Pihak Kedua



EKO PURWANTO, S.STP., M.Si

NIP. 197901161998101001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KASI PELAYANAN UMUM & KESOS PADA KECAMATAN KLIRONG

NO.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terselenggaranya kegiatan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan	2 Sub Keg. 6 Jenis 12 Bulan	6 jenis	6 jenis	6 jenis	6 jenis
2.	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Tertatanya data Kemiskinan	Pemberdayaan PKK, Kepemudaan, Sosial Masyarakat dan Pembinaan UKS, entri data kemiskinan	8 Dokumen	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg

NO	PROGRAM	PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	SUBKEGIATAN
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat/ Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	60.500.000	60.800.000	5 Jenis
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat/ Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.135.522.000	5.000.000	4 Laporan
3	Fasilitas, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/ Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6.000.000	6.000.000	2 Laporan
	Jumlah 1 Kegiatan 3 Subkegiatan	1.202.022.000	71.800.000	

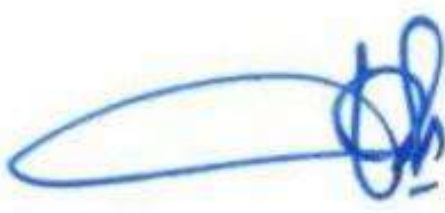
Kebumen, 26 Juni 2025

CAMAT KLIRONG



(EKO PURWANTO, S.STP., M.SI)
NIP. 197901161998101001

PLT KASI PELAYANAN UMUM DAN KESOS



(YAKIRUN)
NIP. 197611291997031001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KLIRONG
Jalan : Klegenwonosari No.- Telp. – Klirong 54381

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Yahya Husni Mubarak, ST.

Jabatan : PLT. KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : EKO PURWANTO, S.STP., M.Si

Jabatan : CAMAT KLIRONG

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



EKO PURWANTO, S.STP., M.Si
NIP. 197901161998101001

Kebumen, 26 Juni 2025
Pihak Pertama

Yahya Husni Mubarak, ST.
NIP. 198408212014031002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KECAMATAN KLIRONG

NO.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terlaksananya Fasilitas, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terselenggaranya Musrenbangdes dan Musrenbangcam	24 Desa 2 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen
2.	Terlaksananya Fasilitas, Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Tersedianya Dokumen Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	24 Desa 2 Dokumen	1 Dok	-	1 Dok	-

NO.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	SUBKEGIATAN
1	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/ Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	28.000.000	24.560.850	2 Dokumen
2	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/ Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12.500.000	12.500.000	2 Dokumen

Kebumen, 26 Juni 2025

CAMAT KLIRONG



(EKO PURWANTO, S.STP.,M.Si)
NIP.197904161998101001

KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(Yahya Husni Mubarak, ST).
NIP. 198408212014031002



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KLIRONG
Jalan : Klegenwonosari No.- Telp. – Klirong 54381

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : YAHYA HUSNI MUBAROK,ST
Jabatan: KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : EKO PURWANTO, S.STP., M.Si
Jabatan: CAMAT KLIRONG

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 26 Juni 2025

Pihak Pertama

YAHYA HUSNI MUBAROK,ST
NIP. 198408212014031002

Pihak Kedua



EKO PURWANTO, S.STP., M.Si
NIP. 197901161998101001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN PADA KECAMATAN KLIRONG

NO.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	1 Sub Keg.	-	-	2 Keg	-
2.	Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terfasilitasinya penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban umum	24 Desa	-	-	1 Dok	-

NO.	Kegiatan/ Sub Kegiatan	PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	SUBKEGIATAN
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah/ Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	10.000.000	10.000.000	2 Kegiatan
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/ Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	6.000.000	6.000.000	1 Dokumen
	Jumlah: 2 Kegiatan/ 2 Sub Kegiatan	16.000.000	16.000.000	

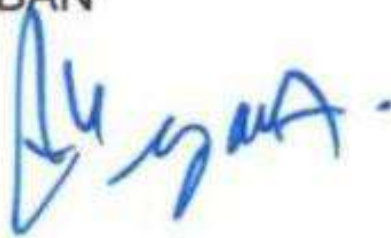
CAMAT KLIRONG



(EKO PURWANTO, S.STP., M.SI)

NIP.197901161998101001

Kebumen, 26 Juni 2025
KASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN



(YAHYA HUSNI MUBAROK,ST)
NIP. 198408212014031002



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KLIRONG
Jalan : Klegenwonosari No.- Telp. – Klirong 54381

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SUPRAPTO
Jabatan : PLT KASI TATA PEMERINTAHAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : EKO PURWANTO, S.STP., M.Si
Jabatan : CAMAT KLIRONG

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 26 Juni 2025

Pihak Kedua



EKO PURWANTO, S.STP., M.Si
NIP. 197901161998101001

Pihak Pertama

SUPRAPTO
NIP. 19680502198912101

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KASI TATA PEMERINTAHAN PADA KECAMATAN KLIRONG

NO.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terbinanya dan Terawasinya Pemerintahan Desa	1 Sub Keg. 24 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen

NO.	Kegiatan	PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	Keterangan*
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/ Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	25.000.000	17.897.700	24 Desa
	Jumlah	25.000.000	17.897.700	

Kebumen, 26 Juni 2025

CAMAT KLIRONG



(EKO PURWANTO, S.STP., M.SI)
NIP.19790116 199810 1 001

KASI TATA PEMERINTAHAN

SUPRAPTO
NIP.19680502198912101

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	OUT PUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN (AKTIFITAS)	TARGET KINERJA				PENAGUNG JAWAB	K E T
			TW	TW	TW	TW								TW	TW	TW	TW		
1	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif.	Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan	88	88	88	88	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota/ Kecamatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.398.867.244	2.410.561.484	Meningkatnya Kinerja Layanan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota di Kecamatan	88	- Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota di Kecamatan - Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					Camat Sekretaris Kecamatan Kasubag Perencanaan dan Keuangan	
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota/ Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota/ Kecamatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat											
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota / Kecamatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota / Kecamatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan.										Kasubag Umpeg	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA				PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	OUT PUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN (AKTIFITAS)	TARGET KINERJA SASARAN				PENANGGUNG JAWAB	KET	
			SASARAN																	
			TW	TW	TW	TW														
			I	II	III	IV								TW	TW	TW	TW			
							Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik/ Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan											Kasi Tapem	
							Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum/ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia											Kasi Trantib	
							Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/ Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan	- Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum												
2	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Terlaksananya Evaluasi Perangkat Daerah (Renstra, RKA, Renja, DPA, LKjIP, SAKIP, RKAP, DPPA)	4 Dok	0 Dok	2 Dok	3 Dok	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota/ Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	7.500.000	7.500.000	Tersusunnya renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA, Perjanjian Kinerja/Sakip, LKjIP, Laporan Keuangan	9 Dok	- Penyusunan Renstra 2022-2025 - Penyusunan Renja 2022 - Penyusunan RKA - Penyusunan DPA - Penyusunan Perjanjian Kinerja/Sakip - Penyusunan LKjIP - Penyusunan RKAP - Penyusunan Laporan Keuangan					Kasubag Perencanaan dan Keuangan		

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	OUT PUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN (AKTIFITAS)	TARGET KINERJA SASARAN				PENAGUN G JAWAB	K E T
			TW	TW	TW	TW								TW	TW	TW	TW		
			I	II	III	IV							- Penyusunan DPPA						
3	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	3 bln	3 bln	3 bln	3 bln	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota/ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.855.856.244	2.024.702.300	Terlaksananya penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan SKPD	12 Bulan 15 Orang	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN per Bulan - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan - Belanja Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Belanja Barang Logistik Kantor (Makan dan Minum) - Belanja Barang Cetakan dan Barang Penggandaan - Belanja Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Belanja Bahan/Material - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kasubag Perencanaan dan Keuangan	
4	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	3 bln	3 bln	3 bln	3 bln	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota/Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyedia Barang Logistik Kantor - Penyedia Barang dan Cetakan Penggandaan - Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Penyedia Bahan/Material - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	57.764.000	53.542.449	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Barang Logistik Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan - Bahan Bacaan dan Perundang-undangan, Bahan/Material, dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Sub Keg. 12 Bulan	- Belanja Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Belanja Barang Logistik Kantor (Makan dan Minum) - Belanja Barang Cetakan dan Barang Penggandaan - Belanja Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Belanja Bahan/Material - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kasubag Umum dan Kepegawaian	
5	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		18 Unit			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota/Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.000.000	41.000.000	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya, Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	2 Sub Keg	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Kasubag Perencanaan dan Keuangan	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN (AKTIFITAS)	TARGET KINERJA				PENANGGUNG JAWAB	KET
			TW	TW	TW	TW								TW	TW	TW	TW		
			I	II	III	IV		-Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				18 Unit	-Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan						
6	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	3	3	3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota/ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Penyedia Jasa Surat Menyurat - Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	56.500.000	56.800.000	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Sub Keg. 12 Bulan	- Belanja Jasa Surat menyurat - Belanja Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Belanja Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kasubag Umum dan Kepegawaian	
7	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	12	14	7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Mebel - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	54.725.000	54.725.000	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pemeliharaan Mebel, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Sub Keg. 7 Paket	- Belanja Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Mebel - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kasubag Umum dan Kepegawaian	
8	Terselenggaranya kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan	Terlaksananya urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan	3	3	3	3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik/	- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1.196.022.000	66.800.000	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	2 Sub Keg 6 Jenis	- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					Kasi Pelayanan Umum dan	

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA				PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	OUT PUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN (AKTIFITAS)	TARGET KINERJA SASARAN				PENANGGUNG JAWAB	K E T
			TW	TW	TW	TW								T W I	T W I I	T W I I I	T W I V		
	dilimpahkan kepada Camat	perizinan dan non perizinan	I	II	III	IV	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	- Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			nonperizinan, dan urusan pemerintah yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan		- Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					Kesejahteraan Sosial	
9	Terselenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Nilai- nilai Luhur Budaya Bangsa	-	-	2	-	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum/ Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Sosial dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	10.000.000	10.000.000	-Terselenggaranya Peringatan HUT RI (Paskibraka, Carnaval, Resepsi dalam rangka HUT RI beserta Hari Jadi)di Kecamatan Klirong	1 Sub Keg. 2 keg	-Terselenggaranya kegiatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI (Paskibraka, Carnaval, Resepsi dalam rangka HUT RI beserta Hari Jadi) di Kecamatan Klirong				Kasi Trantib		
10	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Terbinanya dan Terawasnya Pemerintahan Desa, Pemberdayaan PKK, Kepemudaan , Sosial Masyarakat dan Pembinaan UKS, entri data kemiskinan, Terfasilitasi nya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Terselenggaranya Musrenbang desa dan Musrenbangcam	24 desa	24 desa	24 desa	24 desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/ Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan	119.500.000	96.492.005	Terfasilitasinya Pengelolaan Keuangan desa dan pendayagunaan Aset desa, Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif, Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Koordinasi Pendampingan	6 Sub Kegiatan, 24 desa	- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan Aset Desa - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (IPMD) - Terselenggaranya pelatihan Linmas, Termonitoring nya ketentraman dan ketertiban wilayah - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Musrenbangcam) - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan				Kasi Tapem		

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA				PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	OUT PUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN (AKTIFITAS)	TARGET KINERJA					PENAGUN G JAWAB	K E T																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			SASARAN											SASARAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			TW	TW	TW	TW								T	T	T	T	W			W	W	W	I	I	I	I	V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			I	II	III	IV		Masyarakat Desa					Masyarakat Desa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

CAMAT KLIRONG

KABUPATEN KEBUMEN

EKO PURWANTO, S.STP., M.Si

Pembina Tingkat 1

NIP. 197901161998101001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SKPD : KECAMATAN KLIRONG
Tahun Anggaran : 2025

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SKPD

(SPJ FUNGSIONAL)

Bulan : Desember

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5	BELANJA DAERAH	Rp2.410.561.484,00	Rp1.373.963.862,00	Rp144.210.882,00	Rp1.518.174.744,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp390.772.155,00	Rp12.360.548,00	Rp403.132.703,00	Rp1.921.307.447,00	Rp489.254.037,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp2.341.396.546,00	Rp1.373.963.862,00	Rp144.210.882,00	Rp1.518.174.744,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp325.676.155,00	Rp12.360.548,00	Rp338.036.703,00	Rp1.856.211.447,00	Rp485.185.099,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp1.997.555.000,00	Rp1.373.963.862,00	Rp144.210.882,00	Rp1.518.174.744,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.506,00	Rp0,00	Rp66.506,00	Rp1.518.241.250,00	Rp479.313.750,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp343.841.546,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp325.609.649,00	Rp12.360.548,00	Rp337.970.197,00	Rp337.970.197,00	Rp5.871.349,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp69.164.938,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.096.000,00	Rp0,00	Rp65.096.000,00	Rp65.096.000,00	Rp4.068.938,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp69.164.938,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp65.096.000,00	Rp0,00	Rp65.096.000,00	Rp65.096.000,00	Rp4.068.938,00
KECAMATAN KLIRONG		Rp2.410.561.484,00	Rp1.373.963.862,00	Rp144.210.882,00	Rp1.518.174.744,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp390.772.155,00	Rp12.360.548,00	Rp403.132.703,00	Rp1.921.307.447,00	Rp489.254.037,00
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp2.238.269.479,00	Rp1.373.963.862,00	Rp144.210.882,00	Rp1.518.174.744,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp225.914.391,00	Rp7.396.195,00	Rp233.310.586,00	Rp1.751.485.330,00	Rp486.784.149,00
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp7.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.278.360,00	Rp100.000,00	Rp7.378.360,00	Rp7.378.360,00	Rp121.640,00
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.299.000,00	Rp100.000,00	Rp4.399.000,00	Rp4.399.000,00	Rp101.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.299.000,00	Rp100.000,00	Rp4.399.000,00	Rp4.399.000,00	Rp101.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp4.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.299.000,00	Rp100.000,00	Rp4.399.000,00	Rp4.399.000,00	Rp101.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp3.437.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.236.200,00	Rp100.000,00	Rp3.336.200,00	Rp3.336.200,00	Rp101.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp3.437.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.236.200,00	Rp100.000,00	Rp3.336.200,00	Rp3.336.200,00	Rp101.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp558.740,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp557.200,00	Rp0,00	Rp557.200,00	Rp557.200,00	Rp1.540,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp455.360,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp455.000,00	Rp0,00	Rp455.000,00	Rp455.000,00	Rp360,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp729.860,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp729.000,00	Rp0,00	Rp729.000,00	Rp729.000,00	Rp860,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp212.920,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp205.000,00	Rp0,00	Rp205.000,00	Rp205.000,00	Rp7.920,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.480.320,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.290.000,00	Rp100.000,00	Rp1.390.000,00	Rp1.390.000,00	Rp90.320,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp1.062.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.062.800,00	Rp0,00	Rp1.062.800,00	Rp1.062.800,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp1.062.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.062.800,00	Rp0,00	Rp1.062.800,00	Rp1.062.800,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp1.062.800,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.062.800,00	Rp0,00	Rp1.062.800,00	Rp1.062.800,00	Rp0,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.979.360,00	Rp0,00	Rp2.979.360,00	Rp2.979.360,00	Rp20.640,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.979.360,00	Rp0,00	Rp2.979.360,00	Rp2.979.360,00	Rp20.640,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.979.360,00	Rp0,00	Rp2.979.360,00	Rp2.979.360,00	Rp20.640,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.979.360,00	Rp0,00	Rp2.979.360,00	Rp2.979.360,00	Rp20.640,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.979.360,00	Rp0,00	Rp2.979.360,00	Rp2.979.360,00	Rp20.640,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp532.040,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp532.000,00	Rp0,00	Rp532.000,00	Rp532.000,00	Rp40,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp146.620,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp145.000,00	Rp0,00	Rp145.000,00	Rp145.000,00	Rp1.620,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp904.720,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp902.360,00	Rp0,00	Rp902.360,00	Rp902.360,00	Rp2.360,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp1.416.620,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.400.000,00	Rp0,00	Rp1.400.000,00	Rp1.400.000,00	Rp16.620,00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp2.024.702.030,00	Rp1.373.963.862,00	Rp144.210.882,00	Rp1.518.174.744,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.182.506,00	Rp0,00	Rp27.182.506,00	Rp1.545.357.250,00	Rp479.344.780,00
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp1.997.555.000,00	Rp1.373.963.862,00	Rp144.210.882,00	Rp1.518.174.744,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.506,00	Rp0,00	Rp66.506,00	Rp1.518.241.250,00	Rp479.313.750,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp1.997.555.000,00	Rp1.373.963.862,00	Rp144.210.882,00	Rp1.518.174.744,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.506,00	Rp0,00	Rp66.506,00	Rp1.518.241.250,00	Rp479.313.750,00
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp1.997.555.000,00	Rp1.373.963.862,00	Rp144.210.882,00	Rp1.518.174.744,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.506,00	Rp0,00	Rp66.506,00	Rp1.518.241.250,00	Rp479.313.750,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp1.246.028.000,00	Rp873.849.461,00	Rp67.497.977,00	Rp941.347.438,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp66.506,00	Rp0,00	Rp66.506,00	Rp941.413.944,00	Rp304.614.056,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	Rp942.625.349,00	Rp671.862.260,00	Rp46.778.660,00	Rp718.640.920,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp718.640.920,00	Rp223.984.429,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	Rp857.751.749,00	Rp593.051.060,00	Rp40.716.260,00	Rp633.767.320,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp633.767.320,00	Rp223.984.429,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp84.873.600,00	Rp78.811.200,00	Rp6.062.400,00	Rp84.873.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp84.873.600,00	Rp0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp74.981.704,00	Rp52.932.912,00	Rp3.806.388,00	Rp56.739.300,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp56.739.300,00	Rp18.242.404,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	Rp69.378.456,00	Rp47.729.896,00	Rp3.406.156,00	Rp51.136.052,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp51.136.052,00	Rp18.242.404,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	Rp5.603.248,00	Rp5.203.016,00	Rp400.232,00	Rp5.603.248,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.603.248,00	Rp0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp81.480.000,00	Rp54.820.000,00	Rp4.300.000,00	Rp59.120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.120.000,00	Rp22.360.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	Rp81.480.000,00	Rp54.820.000,00	Rp4.300.000,00	Rp59.120.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.120.000,00	Rp22.360.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp18.060.000,00	Rp11.960.000,00	Rp735.000,00	Rp12.695.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.695.000,00	Rp5.365.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Rp18.060.000,00	Rp11.960.000,00	Rp735.000,00	Rp12.695.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.695.000,00	Rp5.365.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	Rp42.582.960,00	Rp30.850.920,00	Rp2.389.860,00	Rp33.240.780,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.240.780,00	Rp9.342.180,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	Rp37.513.560,00	Rp26.143.620,00	Rp2.027.760,00	Rp28.171.380,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.171.380,00	Rp9.342.180,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp5.069.400,00	Rp4.707.300,00	Rp362.100,00	Rp5.069.400,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.069.400,00	Rp0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Rp6.914.912,00	Rp2.878.910,00	Rp4.036.001,00	Rp6.914.911,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.914.911,00	Rp1,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	Rp6.914.912,00	Rp2.878.910,00	Rp4.036.001,00	Rp6.914.911,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.914.911,00	Rp1,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	Rp11.023,00	Rp7.508,00	Rp586,00	Rp8.094,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.094,00	Rp2.929,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp9.477,00	Rp6.138,00	Rp492,00	Rp6.630,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.630,00	Rp2.847,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp1.546,00	Rp1.370,00	Rp94,00	Rp1.464,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.464,00	Rp82,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Rp70.165.708,00	Rp43.260.370,00	Rp5.002.408,00	Rp48.262.778,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp48.262.778,00	Rp21.902.930,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	Rp66.546.638,00	Rp40.416.815,00	Rp4.743.903,00	Rp45.160.718,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.160.718,00	Rp21.385.920,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	Rp3.619.070,00	Rp2.843.555,00	Rp258.505,00	Rp3.102.060,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.102.060,00	Rp517.010,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	Rp2.302.072,00	Rp1.319.140,00	Rp112.268,00	Rp1.431.408,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.558,00	Rp0,00	Rp29.558,00	Rp1.460.966,00	Rp841.106,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	Rp2.097.872,00	Rp1.159.090,00	Rp97.718,00	Rp1.256.808,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.256.808,00	Rp841.064,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	Rp204.200,00	Rp160.050,00	Rp14.550,00	Rp174.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.558,00	Rp0,00	Rp29.558,00	Rp204.158,00	Rp42,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	Rp6.904.272,00	Rp3.957.441,00	Rp336.806,00	Rp4.294.247,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.948,00	Rp0,00	Rp36.948,00	Rp4.331.195,00	Rp2.573.077,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	Rp6.293.686,00	Rp3.477.302,00	Rp293.157,00	Rp3.770.459,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.770.459,00	Rp2.523.227,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	Rp610.586,00	Rp480.139,00	Rp43.649,00	Rp523.788,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp36.948,00	Rp0,00	Rp36.948,00	Rp560.736,00	Rp49.850,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp751.527.000,00	Rp500.114.401,00	Rp76.712.905,00	Rp576.827.306,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp576.827.306,00	Rp174.699.694,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	Rp751.527.000,00	Rp500.114.401,00	Rp76.712.905,00	Rp576.827.306,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp576.827.306,00	Rp174.699.694,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp751.527.000,00	Rp500.114.401,00	Rp76.712.905,00	Rp576.827.306,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp576.827.306,00	Rp174.699.694,00
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp27.147.030,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.116.000,00	Rp0,00	Rp27.116.000,00	Rp27.116.000,00	Rp31.030,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp27.147.030,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.116.000,00	Rp0,00	Rp27.116.000,00	Rp27.116.000,00	Rp31.030,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp27.147.030,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.116.000,00	Rp0,00	Rp27.116.000,00	Rp27.116.000,00	Rp31.030,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp14.088.010,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.086.000,00	Rp0,00	Rp14.086.000,00	Rp14.086.000,00	Rp2.010,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp14.088.010,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.086.000,00	Rp0,00	Rp14.086.000,00	Rp14.086.000,00	Rp2.010,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp4.088.730,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.088.000,00	Rp0,00	Rp4.088.000,00	Rp4.088.000,00	Rp730,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp1.600.360,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.600.000,00	Rp0,00	Rp1.600.000,00	Rp1.600.000,00	Rp360,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp972.240,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp972.000,00	Rp0,00	Rp972.000,00	Rp972.000,00	Rp240,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp2.050.680,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.050.000,00	Rp0,00	Rp2.050.000,00	Rp2.050.000,00	Rp680,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp5.376.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.376.000,00	Rp0,00	Rp5.376.000,00	Rp5.376.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp13.059.020,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.030.000,00	Rp0,00	Rp13.030.000,00	Rp13.030.000,00	Rp29.020,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp13.059.020,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.030.000,00	Rp0,00	Rp13.030.000,00	Rp13.030.000,00	Rp29.020,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp5.839.580,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.820.000,00	Rp0,00	Rp5.820.000,00	Rp5.820.000,00	Rp19.580,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp7.219.440,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.210.000,00	Rp0,00	Rp7.210.000,00	Rp7.210.000,00	Rp9.440,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp53.542.449,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp52.248.000,00	Rp1.014.400,00	Rp53.262.400,00	Rp53.262.400,00	Rp280.049,00
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp3.595.310,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.595.000,00	Rp0,00	Rp3.595.000,00	Rp3.595.000,00	Rp310,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp3.595.310,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.595.000,00	Rp0,00	Rp3.595.000,00	Rp3.595.000,00	Rp310,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp3.595.310,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.595.000,00	Rp0,00	Rp3.595.000,00	Rp3.595.000,00	Rp310,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp3.595.310,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.595.000,00	Rp0,00	Rp3.595.000,00	Rp3.595.000,00	Rp310,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp3.595.310,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.595.000,00	Rp0,00	Rp3.595.000,00	Rp3.595.000,00	Rp310,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp3.595.310,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.595.000,00	Rp0,00	Rp3.595.000,00	Rp3.595.000,00	Rp310,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp23.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.200.000,00	Rp0,00	Rp23.200.000,00	Rp23.200.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp23.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.200.000,00	Rp0,00	Rp23.200.000,00	Rp23.200.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp23.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.200.000,00	Rp0,00	Rp23.200.000,00	Rp23.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp23.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.200.000,00	Rp0,00	Rp23.200.000,00	Rp23.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp23.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.200.000,00	Rp0,00	Rp23.200.000,00	Rp23.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp23.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp23.200.000,00	Rp0,00	Rp23.200.000,00	Rp23.200.000,00	Rp0,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00	Rp9.000.000,00	Rp9.000.000,00	Rp0,00
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.325.000,00	Rp175.000,00	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.325.000,00	Rp175.000,00	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.325.000,00	Rp175.000,00	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.325.000,00	Rp175.000,00	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.325.000,00	Rp175.000,00	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp2.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.325.000,00	Rp175.000,00	Rp2.500.000,00	Rp2.500.000,00	Rp0,00
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Rp8.514.405,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.439.000,00	Rp0,00	Rp8.439.000,00	Rp8.439.000,00	Rp75.405,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp8.514.405,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.439.000,00	Rp0,00	Rp8.439.000,00	Rp8.439.000,00	Rp75.405,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp8.514.405,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.439.000,00	Rp0,00	Rp8.439.000,00	Rp8.439.000,00	Rp75.405,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp8.514.405,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.439.000,00	Rp0,00	Rp8.439.000,00	Rp8.439.000,00	Rp75.405,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp8.514.405,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.439.000,00	Rp0,00	Rp8.439.000,00	Rp8.439.000,00	Rp75.405,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp3.730.476,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.730.000,00	Rp0,00	Rp3.730.000,00	Rp3.730.000,00	Rp476,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp2.234.319,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.234.000,00	Rp0,00	Rp2.234.000,00	Rp2.234.000,00	Rp319,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp2.549.610,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.475.000,00	Rp0,00	Rp2.475.000,00	Rp2.475.000,00	Rp74.610,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp3.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.410.000,00	Rp539.400,00	Rp2.949.400,00	Rp2.949.400,00	Rp200.600,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp3.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.410.000,00	Rp539.400,00	Rp2.949.400,00	Rp2.949.400,00	Rp200.600,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp3.150.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.410.000,00	Rp539.400,00	Rp2.949.400,00	Rp2.949.400,00	Rp200.600,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp190.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp169.400,00	Rp169.400,00	Rp169.400,00	Rp20.600,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp190.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp169.400,00	Rp169.400,00	Rp169.400,00	Rp20.600,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp190.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp169.400,00	Rp169.400,00	Rp169.400,00	Rp20.600,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp2.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.410.000,00	Rp370.000,00	Rp2.780.000,00	Rp2.780.000,00	Rp180.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp2.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.410.000,00	Rp370.000,00	Rp2.780.000,00	Rp2.780.000,00	Rp180.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp2.960.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.410.000,00	Rp370.000,00	Rp2.780.000,00	Rp2.780.000,00	Rp180.000,00
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp3.582.734,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.279.000,00	Rp300.000,00	Rp3.579.000,00	Rp3.579.000,00	Rp3.734,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp3.582.734,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.279.000,00	Rp300.000,00	Rp3.579.000,00	Rp3.579.000,00	Rp3.734,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp3.582.734,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.279.000,00	Rp300.000,00	Rp3.579.000,00	Rp3.579.000,00	Rp3.734,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp1.712.734,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.709.000,00	Rp0,00	Rp1.709.000,00	Rp1.709.000,00	Rp3.734,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp1.712.734,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.709.000,00	Rp0,00	Rp1.709.000,00	Rp1.709.000,00	Rp3.734,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp535.791,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp535.000,00	Rp0,00	Rp535.000,00	Rp535.000,00	Rp791,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp282.570,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp280.000,00	Rp0,00	Rp280.000,00	Rp280.000,00	Rp2.570,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp287.144,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp287.000,00	Rp0,00	Rp287.000,00	Rp287.000,00	Rp144,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp307.229,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp307.000,00	Rp0,00	Rp307.000,00	Rp307.000,00	Rp229,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp300.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp300.000,00	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp300.000,00	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp300.000,00	Rp1.500.000,00	Rp1.500.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp370.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp370.000,00	Rp0,00	Rp370.000,00	Rp370.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp370.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp370.000,00	Rp0,00	Rp370.000,00	Rp370.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp370.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp370.000,00	Rp0,00	Rp370.000,00	Rp370.000,00	Rp0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp41.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp38.935.000,00	Rp0,00	Rp38.935.000,00	Rp38.935.000,00	Rp2.065.000,00
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.545.000,00	Rp0,00	Rp33.545.000,00	Rp33.545.000,00	Rp1.455.000,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.545.000,00	Rp0,00	Rp33.545.000,00	Rp33.545.000,00	Rp1.455.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp35.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp33.545.000,00	Rp0,00	Rp33.545.000,00	Rp33.545.000,00	Rp1.455.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp10.982.824,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.945.000,00	Rp0,00	Rp10.945.000,00	Rp10.945.000,00	Rp37.824,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Rp10.982.824,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.945.000,00	Rp0,00	Rp10.945.000,00	Rp10.945.000,00	Rp37.824,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	Rp10.982.824,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.945.000,00	Rp0,00	Rp10.945.000,00	Rp10.945.000,00	Rp37.824,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	Rp24.017.176,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.600.000,00	Rp0,00	Rp22.600.000,00	Rp22.600.000,00	Rp1.417.176,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	Rp24.017.176,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.600.000,00	Rp0,00	Rp22.600.000,00	Rp22.600.000,00	Rp1.417.176,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp24.017.176,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp22.600.000,00	Rp0,00	Rp22.600.000,00	Rp22.600.000,00	Rp1.417.176,00
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.390.000,00	Rp0,00	Rp5.390.000,00	Rp5.390.000,00	Rp610.000,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.390.000,00	Rp0,00	Rp5.390.000,00	Rp5.390.000,00	Rp610.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.390.000,00	Rp0,00	Rp5.390.000,00	Rp5.390.000,00	Rp610.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.390.000,00	Rp0,00	Rp5.390.000,00	Rp5.390.000,00	Rp610.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	Rp5.482.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.875.000,00	Rp0,00	Rp4.875.000,00	Rp4.875.000,00	Rp607.500,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Rp5.482.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.875.000,00	Rp0,00	Rp4.875.000,00	Rp4.875.000,00	Rp607.500,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Rp517.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp515.000,00	Rp0,00	Rp515.000,00	Rp515.000,00	Rp2.500,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp517.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp515.000,00	Rp0,00	Rp515.000,00	Rp515.000,00	Rp2.500,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp56.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.992.975,00	Rp6.160.795,00	Rp52.153.770,00	Rp52.153.770,00	Rp4.646.230,00
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.496.000,00	Rp0,00	Rp1.496.000,00	Rp1.496.000,00	Rp4.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.496.000,00	Rp0,00	Rp1.496.000,00	Rp1.496.000,00	Rp4.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.496.000,00	Rp0,00	Rp1.496.000,00	Rp1.496.000,00	Rp4.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.496.000,00	Rp0,00	Rp1.496.000,00	Rp1.496.000,00	Rp4.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.496.000,00	Rp0,00	Rp1.496.000,00	Rp1.496.000,00	Rp4.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp1.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.496.000,00	Rp0,00	Rp1.496.000,00	Rp1.496.000,00	Rp4.000,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.569.975,00	Rp1.790.195,00	Rp20.360.170,00	Rp20.360.170,00	Rp4.639.830,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.569.975,00	Rp1.790.195,00	Rp20.360.170,00	Rp20.360.170,00	Rp4.639.830,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.569.975,00	Rp1.790.195,00	Rp20.360.170,00	Rp20.360.170,00	Rp4.639.830,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.569.975,00	Rp1.790.195,00	Rp20.360.170,00	Rp20.360.170,00	Rp4.639.830,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp25.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp18.569.975,00	Rp1.790.195,00	Rp20.360.170,00	Rp20.360.170,00	Rp4.639.830,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.728.350,00	Rp429.850,00	Rp5.158.200,00	Rp5.158.200,00	Rp841.800,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.047.100,00	Rp236.800,00	Rp2.283.900,00	Rp2.283.900,00	Rp116.100,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	Rp16.600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.794.525,00	Rp1.123.545,00	Rp12.918.070,00	Rp12.918.070,00	Rp3.681.930,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp30.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.927.000,00	Rp4.370.600,00	Rp30.297.600,00	Rp30.297.600,00	Rp2.400,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp30.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.927.000,00	Rp4.370.600,00	Rp30.297.600,00	Rp30.297.600,00	Rp2.400,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp30.300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp25.927.000,00	Rp4.370.600,00	Rp30.297.600,00	Rp30.297.600,00	Rp2.400,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp5.568.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.267.000,00	Rp298.600,00	Rp5.565.600,00	Rp5.565.600,00	Rp2.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp5.568.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.267.000,00	Rp298.600,00	Rp5.565.600,00	Rp5.565.600,00	Rp2.400,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp4.480.268,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.180.000,00	Rp298.600,00	Rp4.478.600,00	Rp4.478.600,00	Rp1.668,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp1.087.732,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.087.000,00	Rp0,00	Rp1.087.000,00	Rp1.087.000,00	Rp732,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp24.732.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.660.000,00	Rp4.072.000,00	Rp24.732.000,00	Rp24.732.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp24.732.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.660.000,00	Rp4.072.000,00	Rp24.732.000,00	Rp24.732.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp300.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp300.000,00	Rp300.000,00	Rp300.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp24.432.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.660.000,00	Rp3.772.000,00	Rp24.432.000,00	Rp24.432.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp54.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.277.550,00	Rp121.000,00	Rp54.398.550,00	Rp54.398.550,00	Rp326.450,00
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp32.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.552.550,00	Rp121.000,00	Rp31.673.550,00	Rp31.673.550,00	Rp326.450,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp32.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.552.550,00	Rp121.000,00	Rp31.673.550,00	Rp31.673.550,00	Rp326.450,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp32.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp31.552.550,00	Rp121.000,00	Rp31.673.550,00	Rp31.673.550,00	Rp326.450,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp26.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.032.050,00	Rp121.000,00	Rp26.153.050,00	Rp26.153.050,00	Rp6.950,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp26.160.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.032.050,00	Rp121.000,00	Rp26.153.050,00	Rp26.153.050,00	Rp6.950,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp20.721.069,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.593.250,00	Rp121.000,00	Rp20.714.250,00	Rp20.714.250,00	Rp6.819,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	Rp5.438.931,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.438.800,00	Rp0,00	Rp5.438.800,00	Rp5.438.800,00	Rp131,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp3.840.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.520.500,00	Rp0,00	Rp3.520.500,00	Rp3.520.500,00	Rp319.500,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp3.840.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.520.500,00	Rp0,00	Rp3.520.500,00	Rp3.520.500,00	Rp319.500,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp3.840.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.520.500,00	Rp0,00	Rp3.520.500,00	Rp3.520.500,00	Rp319.500,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00	Rp2.000.000,00	Rp2.000.000,00	Rp0,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp10.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.725.000,00	Rp0,00	Rp10.725.000,00	Rp10.725.000,00	Rp0,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp10.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.725.000,00	Rp0,00	Rp10.725.000,00	Rp10.725.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp10.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.725.000,00	Rp0,00	Rp10.725.000,00	Rp10.725.000,00	Rp0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	Rp10.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.725.000,00	Rp0,00	Rp10.725.000,00	Rp10.725.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp10.725.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.725.000,00	Rp0,00	Rp10.725.000,00	Rp10.725.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp2.440.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.440.000,00	Rp0,00	Rp2.440.000,00	Rp2.440.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	Rp1.835.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.835.000,00	Rp0,00	Rp1.835.000,00	Rp1.835.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp4.380.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.380.000,00	Rp0,00	Rp4.380.000,00	Rp4.380.000,00	Rp0,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Rp2.070.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.070.000,00	Rp0,00	Rp2.070.000,00	Rp2.070.000,00	Rp0,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1	BELANJA OPERASI	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp5.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.800.000,00	Rp0,00	Rp5.800.000,00	Rp5.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp5.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.800.000,00	Rp0,00	Rp5.800.000,00	Rp5.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp5.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.800.000,00	Rp0,00	Rp5.800.000,00	Rp5.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp4.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.200.000,00	Rp0,00	Rp4.200.000,00	Rp4.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp4.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.200.000,00	Rp0,00	Rp4.200.000,00	Rp4.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	Rp4.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.200.000,00	Rp0,00	Rp4.200.000,00	Rp4.200.000,00	Rp0,00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp65.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.573.264,00	Rp4.105.253,00	Rp63.678.517,00	Rp63.678.517,00	Rp2.121.483,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp65.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp59.573.264,00	Rp4.105.253,00	Rp63.678.517,00	Rp63.678.517,00	Rp2.121.483,00
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Rp60.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp54.613.264,00	Rp4.105.253,00	Rp58.718.517,00	Rp58.718.517,00	Rp2.081.483,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp32.635.062,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.452.264,00	Rp4.105.253,00	Rp32.557.517,00	Rp32.557.517,00	Rp77.545,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp32.635.062,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp28.452.264,00	Rp4.105.253,00	Rp32.557.517,00	Rp32.557.517,00	Rp77.545,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp7.503.062,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.493.000,00	Rp0,00	Rp7.493.000,00	Rp7.493.000,00	Rp10.062,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp7.503.062,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.493.000,00	Rp0,00	Rp7.493.000,00	Rp7.493.000,00	Rp10.062,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.290.357,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.290.000,00	Rp0,00	Rp1.290.000,00	Rp1.290.000,00	Rp357,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp2.788.475,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.785.000,00	Rp0,00	Rp2.785.000,00	Rp2.785.000,00	Rp3.475,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.722.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.718.000,00	Rp0,00	Rp2.718.000,00	Rp2.718.000,00	Rp4.500,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp701.730,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp700.000,00	Rp0,00	Rp700.000,00	Rp700.000,00	Rp1.730,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp25.132.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.959.264,00	Rp4.105.253,00	Rp25.064.517,00	Rp25.064.517,00	Rp67.483,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp24.732.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.660.000,00	Rp4.072.000,00	Rp24.732.000,00	Rp24.732.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp24.732.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.660.000,00	Rp4.072.000,00	Rp24.732.000,00	Rp24.732.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	Rp400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp299.264,00	Rp33.253,00	Rp332.517,00	Rp332.517,00	Rp67.483,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp137.733,00	Rp33.253,00	Rp170.986,00	Rp170.986,00	Rp29.014,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp161.531,00	Rp0,00	Rp161.531,00	Rp161.531,00	Rp38.469,00
5.2	BELANJA MODAL	Rp28.164.938,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.161.000,00	Rp0,00	Rp26.161.000,00	Rp26.161.000,00	Rp2.003.938,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp28.164.938,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp26.161.000,00	Rp0,00	Rp26.161.000,00	Rp26.161.000,00	Rp2.003.938,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp9.677.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.661.000,00	Rp0,00	Rp9.661.000,00	Rp9.661.000,00	Rp16.250,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Rp9.677.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.661.000,00	Rp0,00	Rp9.661.000,00	Rp9.661.000,00	Rp16.250,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp4.761.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.761.000,00	Rp0,00	Rp4.761.000,00	Rp4.761.000,00	Rp0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp4.916.250,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.900.000,00	Rp0,00	Rp4.900.000,00	Rp4.900.000,00	Rp16.250,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	Rp18.487.688,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.500.000,00	Rp0,00	Rp16.500.000,00	Rp16.500.000,00	Rp1.987.688,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	Rp18.487.688,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.500.000,00	Rp0,00	Rp16.500.000,00	Rp16.500.000,00	Rp1.987.688,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	Rp18.487.688,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.500.000,00	Rp0,00	Rp16.500.000,00	Rp16.500.000,00	Rp1.987.688,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.960.000,00	Rp0,00	Rp4.960.000,00	Rp4.960.000,00	Rp40.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.960.000,00	Rp0,00	Rp4.960.000,00	Rp4.960.000,00	Rp40.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.960.000,00	Rp0,00	Rp4.960.000,00	Rp4.960.000,00	Rp40.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.960.000,00	Rp0,00	Rp4.960.000,00	Rp4.960.000,00	Rp40.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.960.000,00	Rp0,00	Rp4.960.000,00	Rp4.960.000,00	Rp40.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp5.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.960.000,00	Rp0,00	Rp4.960.000,00	Rp4.960.000,00	Rp40.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.989.000,00	Rp0,00	Rp9.989.000,00	Rp9.989.000,00	Rp11.000,00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.989.000,00	Rp0,00	Rp9.989.000,00	Rp9.989.000,00	Rp11.000,00
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.989.000,00	Rp0,00	Rp9.989.000,00	Rp9.989.000,00	Rp11.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.989.000,00	Rp0,00	Rp9.989.000,00	Rp9.989.000,00	Rp11.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp10.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.989.000,00	Rp0,00	Rp9.989.000,00	Rp9.989.000,00	Rp11.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp9.192.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.189.000,00	Rp0,00	Rp9.189.000,00	Rp9.189.000,00	Rp3.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp9.192.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.189.000,00	Rp0,00	Rp9.189.000,00	Rp9.189.000,00	Rp3.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp158.185,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp158.000,00	Rp0,00	Rp158.000,00	Rp158.000,00	Rp185,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp136.620,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp136.000,00	Rp0,00	Rp136.000,00	Rp136.000,00	Rp620,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp497.195,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp495.000,00	Rp0,00	Rp495.000,00	Rp495.000,00	Rp2.195,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp8.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp8.400.000,00	Rp0,00	Rp8.400.000,00	Rp8.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp808.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp800.000,00	Rp8.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	Rp808.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp800.000,00	Rp8.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp808.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp0,00	Rp800.000,00	Rp800.000,00	Rp8.000,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp96.492.005,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.295.500,00	Rp859.100,00	Rp96.154.600,00	Rp96.154.600,00	Rp337.405,00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp96.492.005,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp95.295.500,00	Rp859.100,00	Rp96.154.600,00	Rp96.154.600,00	Rp337.405,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp17.897.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.866.000,00	Rp859.100,00	Rp17.725.100,00	Rp17.725.100,00	Rp172.600,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp17.897.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.866.000,00	Rp859.100,00	Rp17.725.100,00	Rp17.725.100,00	Rp172.600,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp17.897.700,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.866.000,00	Rp859.100,00	Rp17.725.100,00	Rp17.725.100,00	Rp172.600,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp15.256.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.226.000,00	Rp859.100,00	Rp15.085.100,00	Rp15.085.100,00	Rp171.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp15.256.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.226.000,00	Rp859.100,00	Rp15.085.100,00	Rp15.085.100,00	Rp171.400,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp882.960,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp859.100,00	Rp859.100,00	Rp859.100,00	Rp23.860,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.450.600,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.450.000,00	Rp0,00	Rp1.450.000,00	Rp1.450.000,00	Rp600,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp1.056.480,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.055.000,00	Rp0,00	Rp1.055.000,00	Rp1.055.000,00	Rp1.480,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.923.240,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.921.000,00	Rp0,00	Rp1.921.000,00	Rp1.921.000,00	Rp2.240,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp9.943.220,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp9.800.000,00	Rp0,00	Rp9.800.000,00	Rp9.800.000,00	Rp143.220,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp2.641.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.640.000,00	Rp0,00	Rp2.640.000,00	Rp2.640.000,00	Rp1.200,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp2.641.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.640.000,00	Rp0,00	Rp2.640.000,00	Rp2.640.000,00	Rp1.200,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp2.641.200,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.640.000,00	Rp0,00	Rp2.640.000,00	Rp2.640.000,00	Rp1.200,00
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp12.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.480.000,00	Rp0,00	Rp12.480.000,00	Rp12.480.000,00	Rp20.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp12.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.480.000,00	Rp0,00	Rp12.480.000,00	Rp12.480.000,00	Rp20.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp12.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.480.000,00	Rp0,00	Rp12.480.000,00	Rp12.480.000,00	Rp20.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp12.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.480.000,00	Rp0,00	Rp12.480.000,00	Rp12.480.000,00	Rp20.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp12.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.480.000,00	Rp0,00	Rp12.480.000,00	Rp12.480.000,00	Rp20.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp941.754,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp941.000,00	Rp0,00	Rp941.000,00	Rp941.000,00	Rp754,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp944.175,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp940.000,00	Rp0,00	Rp940.000,00	Rp940.000,00	Rp4.175,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp3.025.256,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.024.000,00	Rp0,00	Rp3.024.000,00	Rp3.024.000,00	Rp1.256,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp388.815,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp375.000,00	Rp0,00	Rp375.000,00	Rp375.000,00	Rp13.815,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp7.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp7.200.000,00	Rp0,00	Rp7.200.000,00	Rp7.200.000,00	Rp0,00
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.997.000,00	Rp0,00	Rp5.997.000,00	Rp5.997.000,00	Rp3.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.997.000,00	Rp0,00	Rp5.997.000,00	Rp5.997.000,00	Rp3.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.997.000,00	Rp0,00	Rp5.997.000,00	Rp5.997.000,00	Rp3.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp2.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.697.000,00	Rp0,00	Rp2.697.000,00	Rp2.697.000,00	Rp3.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp2.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.697.000,00	Rp0,00	Rp2.697.000,00	Rp2.697.000,00	Rp3.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp588.942,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp588.000,00	Rp0,00	Rp588.000,00	Rp588.000,00	Rp942,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.511.058,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.509.000,00	Rp0,00	Rp1.509.000,00	Rp1.509.000,00	Rp2.058,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp600.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp600.000,00	Rp0,00	Rp600.000,00	Rp600.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp900.000,00	Rp0,00	Rp900.000,00	Rp900.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp900.000,00	Rp0,00	Rp900.000,00	Rp900.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp900.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp900.000,00	Rp0,00	Rp900.000,00	Rp900.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00	Rp0,00
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Rp24.560.805,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.473.500,00	Rp0,00	Rp24.473.500,00	Rp24.473.500,00	Rp87.305,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp24.560.805,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.473.500,00	Rp0,00	Rp24.473.500,00	Rp24.473.500,00	Rp87.305,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp24.560.805,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.473.500,00	Rp0,00	Rp24.473.500,00	Rp24.473.500,00	Rp87.305,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp24.560.805,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.473.500,00	Rp0,00	Rp24.473.500,00	Rp24.473.500,00	Rp87.305,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp24.560.805,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp24.473.500,00	Rp0,00	Rp24.473.500,00	Rp24.473.500,00	Rp87.305,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp5.859.405,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.859.000,00	Rp0,00	Rp5.859.000,00	Rp5.859.000,00	Rp405,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp838.110,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp838.000,00	Rp0,00	Rp838.000,00	Rp838.000,00	Rp110,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.476.650,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.476.500,00	Rp0,00	Rp2.476.500,00	Rp2.476.500,00	Rp150,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp1.726.860,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.700.000,00	Rp0,00	Rp1.700.000,00	Rp1.700.000,00	Rp26.860,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp13.659.780,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp13.600.000,00	Rp0,00	Rp13.600.000,00	Rp13.600.000,00	Rp59.780,00
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp29.533.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.482.500,00	Rp0,00	Rp29.482.500,00	Rp29.482.500,00	Rp51.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp29.533.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.482.500,00	Rp0,00	Rp29.482.500,00	Rp29.482.500,00	Rp51.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp29.533.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp29.482.500,00	Rp0,00	Rp29.482.500,00	Rp29.482.500,00	Rp51.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp21.433.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.407.500,00	Rp0,00	Rp21.407.500,00	Rp21.407.500,00	Rp26.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp21.433.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp21.407.500,00	Rp0,00	Rp21.407.500,00	Rp21.407.500,00	Rp26.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.406.855,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.406.000,00	Rp0,00	Rp1.406.000,00	Rp1.406.000,00	Rp855,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp1.258.746,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.258.000,00	Rp0,00	Rp1.258.000,00	Rp1.258.000,00	Rp746,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp2.272.259,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.268.500,00	Rp0,00	Rp2.268.500,00	Rp2.268.500,00	Rp3.759,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp935.640,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp935.000,00	Rp0,00	Rp935.000,00	Rp935.000,00	Rp640,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp15.560.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp15.540.000,00	Rp0,00	Rp15.540.000,00	Rp15.540.000,00	Rp20.000,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp0,00	Rp2.400.000,00	Rp2.400.000,00	Rp0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp5.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.675.000,00	Rp0,00	Rp5.675.000,00	Rp5.675.000,00	Rp25.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp5.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.675.000,00	Rp0,00	Rp5.675.000,00	Rp5.675.000,00	Rp25.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp5.700.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.675.000,00	Rp0,00	Rp5.675.000,00	Rp5.675.000,00	Rp25.000,00
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.996.500,00	Rp0,00	Rp5.996.500,00	Rp5.996.500,00	Rp3.500,00
5.1	BELANJA OPERASI	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.996.500,00	Rp0,00	Rp5.996.500,00	Rp5.996.500,00	Rp3.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp6.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.996.500,00	Rp0,00	Rp5.996.500,00	Rp5.996.500,00	Rp3.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp4.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.796.500,00	Rp0,00	Rp4.796.500,00	Rp4.796.500,00	Rp3.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp4.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.796.500,00	Rp0,00	Rp4.796.500,00	Rp4.796.500,00	Rp3.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.007.588,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.007.000,00	Rp0,00	Rp1.007.000,00	Rp1.007.000,00	Rp588,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp215.900,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp215.000,00	Rp0,00	Rp215.000,00	Rp215.000,00	Rp900,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp776.512,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp774.500,00	Rp0,00	Rp774.500,00	Rp774.500,00	Rp2.012,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp2.800.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.800.000,00	Rp0,00	Rp2.800.000,00	Rp2.800.000,00	Rp0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp1.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp1.200.000,00	Rp0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp0,00	Rp1.200.000,00	Rp1.200.000,00	Rp0,00
JUMLAH		Rp2.410.561.484,00	Rp1.373.963.862,00	Rp144.210.882,00	Rp1.518.174.744,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp390.772.155,00	Rp12.360.548,00	Rp403.132.703,00	Rp1.921.307.447,00	Rp489.254.037,00
Penerimaan :													
- SP2D:													
UP			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp40.143.600,00	Rp0,00	Rp40.143.600,00	Rp40.143.600,00	Rp0,00
GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp361.627.872,00	Rp2.036.000,00	Rp363.663.872,00	Rp363.663.872,00	Rp0,00
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
LS			Rp1.373.963.862,00	Rp144.210.882,00	Rp1.518.174.744,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.518.174.744,00	Rp0,00
GU-KKPD			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp500.000,00	Rp0,00
- Potongan:													
1. Iuran Wajib Pegawai 8%			Rp41.726.151,00	Rp3.529.794,00	Rp45.255.945,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.255.945,00	Rp0,00
2. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS			Rp96.542,00	Rp0,00	Rp96.542,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp96.542,00	Rp0,00
3. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK			Rp258.505,00	Rp0,00	Rp258.505,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp258.505,00	Rp0,00
4. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			Rp5.349,00	Rp0,00	Rp5.349,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.349,00	Rp0,00
5. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			Rp14.550,00	Rp0,00	Rp14.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.550,00	Rp0,00

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
- SPJ:													
UP/GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp390.272.155,00	Rp12.360.548,00	Rp402.632.703,00	Rp402.632.703,00	Rp0,00
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
LS			Rp1.373.963.862,00	Rp144.210.882,00	Rp1.518.174.744,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.518.174.744,00	Rp0,00
GU-KKPD			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp500.000,00	Rp0,00
- Potongan:													
1. Iuran Wajib Pegawai 8%			Rp41.726.151,00	Rp3.529.794,00	Rp45.255.945,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp45.255.945,00	Rp0,00
2. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS			Rp96.542,00	Rp0,00	Rp96.542,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp96.542,00	Rp0,00
3. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK			Rp258.505,00	Rp0,00	Rp258.505,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp258.505,00	Rp0,00
4. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			Rp5.349,00	Rp0,00	Rp5.349,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.349,00	Rp0,00
5. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			Rp14.550,00	Rp0,00	Rp14.550,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp14.550,00	Rp0,00
6. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS			Rp16.046,00	Rp0,00	Rp16.046,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp16.046,00	Rp0,00
7. Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK			Rp43.649,00	Rp0,00	Rp43.649,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp43.649,00	Rp0,00
8. Iuran Jaminan Kesehatan 4%			Rp25.561.363,00	Rp2.224.800,00	Rp27.786.163,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp27.786.163,00	Rp0,00
9. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja			Rp1.299.241,00	Rp112.268,00	Rp1.411.509,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.411.509,00	Rp0,00
10. Iuran Jaminan Kematian			Rp3.897.746,00	Rp336.806,00	Rp4.234.552,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.234.552,00	Rp0,00
11. Iuran Wajib Pegawai			Rp4.400.617,00	Rp694.402,00	Rp5.095.019,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.095.019,00	Rp0,00
12. Iuran Wajib Pegawai 1%			Rp6.414.477,00	Rp556.200,00	Rp6.970.677,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.970.677,00	Rp0,00
13. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
14. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
15. Taperum			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
16. Taspen			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
17. Askes			Rp17.343.960,00	Rp2.777.608,00	Rp20.121.568,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp20.121.568,00	Rp0,00
18. Lainnya			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
19. Sewa Rumah			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
20. Beras (BULOG)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
21. Zakat			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
22. Jaminan Hari Tua			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Total Potongan			Rp101.078.196,00	Rp10.231.878,00	Rp111.310.074,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp117.559.809,00	Rp0,00
- Pajak:													
1. Pajak Pertambahan Nilai			Rp3.625.914,00	Rp0,00	Rp3.625.914,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.917.073,00	Rp0,00	Rp1.917.073,00	Rp5.542.987,00	Rp0,00
2. Pajak Penghasilan Ps 22			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp224.300,00	Rp0,00	Rp224.300,00	Rp224.300,00	Rp0,00

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji			SPJ - LS Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini		
1	2	3	4	5	6 = (4+5)	7	8	9 = (7+8)	10	11	12 = (10+11)	13 = (6+9+12)	14 = (3-13)
3. PPH 21			Rp40.680.711,00	Rp7.466.789,00	Rp48.147.500,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.103.140,00	Rp0,00	Rp1.103.140,00	Rp49.250.640,00	Rp0,00
4. Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
5. Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PPPK			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
6. Pajak Penghasilan Ps 23			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp2.997.222,00	Rp8.000,00	Rp3.005.222,00	Rp3.005.222,00	Rp0,00
7. Pajak Penghasilan Ps 25			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
8. Pajak Penghasilan Ps 26			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
9. Pajak Penghasilan Ps 4 (2)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
10. Pajak Penghasilan Ps Ps 15			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Total Pajak			Rp44.306.625,00	Rp7.466.789,00	Rp51.773.414,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp6.241.735,00	Rp8.000,00	Rp6.249.735,00	Rp58.023.149,00	Rp0,00
- SPJ (Netto):													
UP/GU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp384.030.420,00	Rp12.352.548,00	Rp396.382.968,00	Rp396.382.968,00	Rp0,00
TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
LS			Rp1.228.579.041,00	Rp126.512.215,00	Rp1.355.091.256,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.355.091.256,00	Rp0,00
GU-KKPD			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp0,00	Rp500.000,00	Rp500.000,00	Rp0,00
Pengembalian ke Kasda (STS)			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.174.769,00	Rp1.174.769,00	Rp1.174.769,00	Rp0,00
JUMLAH PENGELUARAN			Rp1.373.963.862,00	Rp144.210.882,00	Rp1.518.174.744,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp390.772.155,00	Rp12.360.548,00	Rp403.132.703,00	Rp1.921.307.447,00	Rp0,00
Saldo Kas UP/GU/TU			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.499.317,00	Rp11.499.317,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Saldo Kas KKPD			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
Saldo Kas			Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp11.499.317,00	Rp11.499.317,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Menyetujui,

-

Disiapkan oleh,

PPK SKPD

-

NIP: -

MOH. AFANDI, S.H

NIP. 197209161994021003